



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

LAPORAN MONEV TRIWULAN I 2025

DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



<https://ditjenpkh.pertanian.go.id>



@ditjen_pkh



Ditjen PKH Kementan RI

**LAPORAN MONITORING EVALUASI & PELAPORAN
TRIWULAN I TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2025**

KATA PENGANTAR

Monitoring, Evaluasi (Monev) dan Pelaporan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi salah satu bagian siklus manajemen yang mempunyai peran penting dan strategis. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi untuk menyampaikan informasi perkembangan kinerja, permasalahan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi sebagai upaya tindak lanjut untuk penyelesaian masalah.

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Triwulan I Tahun 2025 menggambarkan capaian kinerja yang meliputi:

- 1) Indikator Kinerja Sasaran Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025;
- 2) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025;
- 3) Kegiatan Strategis yang meliputi: a). Pengembangan Investasi; b). Pengembangan Ayam Ras Petelur (Ayam Merah Putih); c). Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); d). Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); serta e). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik; dan
- 4) Kinerja Implementasi RKAKL Tahun 2025, berupa realisasi dan progres terhadap capaian Rincian Output (RO).

Penyusunan laporan ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, sehingga diharapkan ada saran dan masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan penyusunan laporan pada periode mendatang.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak atas kerja samanya, sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk pengambilan kebijakan bagi pimpinan.



Jakarta, 23 April 2025
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tri Melasari, S.Pt, M.Si.
NIP. 19720309 200212 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Program dan Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2025.....	1
B. Ruang Lingkup, Instrumen, dan Sasaran Monev Tahun 2025	3
BAB II CAPAIAN KINERJA DITJEN PKH TRIWULAN IV TAHUN 2025.....	11
A. Indikator Kinerja Sasaran Program Ditjen PKH.....	11
B. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ditjen PKH.....	12
C. Kinerja Kegiatan Strategis	12
D. Implementasi RKAKL.....	22
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	33
A. Kesimpulan.....	33
B. Rekomendasi	36
C. Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Monev Triwulan I TA. 2025.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Ditjen PKH Tahun 2025	1
Tabel 2.	Proporsi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2025 Per Kegiatan	3
Tabel 3.	Capaian IKU Ditjen PKH Triwulan I Tahun 2025	11
Tabel 4.	Realisasi Anggaran per Jenis Kewenangan per 31 Maret 2025.....	23
Tabel 5.	Realisasi Anggaran per Kegiatan Utama per 31 Maret 2024.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator Kegiatan Fungsi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025	39
Lampiran 2. Capaian Kinerja Fungsi Pakan Ditjen Triwulan I Tahun 2025	45
Lampiran 3. Capaian Kinerja Fungsi Kesehatan Hewan Triwulan I Tahun 2025	46
Lampiran 4. Capaian Kinerja Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak Triwulan I Tahun 2025.....	49
Lampiran 5. Capaian Kinerja Fungsi Kesmavet Triwulan I Tahun 2025.....	51
Lampiran 6. Capaian Kinerja Fungsi Hilirisasi Hasil Peternakan Triwulan I Tahun 2025	52
Lampiran 7. Capaian Kinerja Fungsi Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2025	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Ditjen PKH mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen PKH menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2 Arah dan Kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

Arah dan Kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) tahun 2025 masih mengacu pada arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, serta Renstra Ditjen PKH TAHUN 2020-2024 karena masih belum selesai. Kebijakan Ditjen PKH diarahkan mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan: visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka Ditjen PKH

menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Peternakan yang Sesuai dengan *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP)

GBP dan GFP adalah pelaksanaan usaha peternakan di bidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. GBP dan GFP meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit dan ternak; pelestarian lingkungan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Penyediaan benih/bibit dan peningkatan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Penyediaan pakan yang berkualitas, aman dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal.
- c. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

2) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penciptaan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk baik dengan perbaikan proses budidaya seperti pada peternakan organik, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan maupun pada proses pemasaran. Peningkatan daya saing atau keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dapat dicapai melalui daya saing mutu dan daya saing harga yang diperoleh sebagai dampak efisiensi usaha, dan didukung dengan peningkatan akses pasar.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Peningkatan nilai tambah produk peternakan melalui pengolahan hasil peternakan dan pengembangan peternakan organik.
- b. Peningkatan daya saing produk peternakan melalui pengembangan investasi, kemitraan, kelembagaan peternak, fasilitasi prasarana dan sarana pemasaran hasil peternakan, promosi peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri serta pengembangan sistem pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

3) Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan

higiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana yang berdampak pada hewan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- Meningkatkan kesehatan hewan
- Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

4) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akunTabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PKH dilakukan berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen PKH dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Arah kebijakan Kementerian Pertanian yang berkaitan langsung dengan rumusan kebijakan Ditjen PKH yaitu terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

1.3 Dukungan Anggaran



Grafik 1 Alokasi Anggaran Ditjen PKH TA 2025

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2025, sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, Ditjen PKH memperoleh alokasi APBN sebesar Rp.1.246.791.406.000,00 (*satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah*) dengan jumlah blokir anggaran sebesar Rp. **227.100.590.000** (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*). Proporsi anggaran terbesar berdasarkan kewenangan terdapat pada Kantor Daerah sebesar Rp. 1.126.071.711.000,00 (90,32%). Selanjutnya, proporsi anggaran terbesar berdasarkan jenis belanja terdapat pada Belanja Operasional sebesar Rp. 809.146.069.000,00 (64,90%), dan berdasarkan program terdapat pada program Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp. 761.579.417.000,00 (61,08%).

Secara teknis dan manajemen, proporsi anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 dialokasikan untuk memfasilitasi 6 (enam) kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu: (1) Peningkatan Produksi Pakan Ternak sebesar Rp.6,083 miliar (0,49%); 2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebesar Rp.340,206 miliar (27,29%); 3) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp.398 miliar (18,50%); 4) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp.17,288 miliar (1,39%); 5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan sebesar Rp.480,711 miliar (38,56%); dan 6) Hilirisasi Hasil Peternakan sebesar Rp.4,500 miliar (0,36%). Rincian Proporsi Anggaran Kegiatan Utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Proporsi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2025 Per Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Proporsi (%)	Anggaran yang dapat digunakan (Rp.)	Anggaran Terblokir (Rp.)
1.	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	398.288.959.000	31,94	210.238.189.000	187.762.770.000
2.	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	6.083.206.000	0,49	4.806.110.000	1.277.096.000
3.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	340.206.693.000	27,28	324.339.716.000	15.866.977.000
4.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	17.288.559.000	1,39	14.504.316.000	2.784.243.000
5.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	4.500.000.000	0,36	2.333.340.000	2.266.660.000

6.	Program Dukungan Manajemen (Mandatory)	480.711.989.000	38,55	463.569.145.000	17.142.844.000
Jumlah		1.247.079.406.000	100,00	1.019.790.816.000	227.100.590.000

Sumber:

1.4 Ruang Lingkup, Instrumen, Dan Sasaran Monev Tahun 2025

Monitoring dan Evaluasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 diarahkan untuk dapat memantau dan mengukur perkembangan kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Sasaran Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025;
- 2) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025;
- 3) Kegiatan Strategis yang meliputi: a). Pengembangan Investasi; b). Pengembangan Ayam Ras Petelur (Ayam Merah Putih); c). Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); d). Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); serta e). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik; dan
- 4) Kinerja Implementasi RKAKL Tahun 2025, berupa realisasi dan progres terhadap capaian Rincian Output (RO).

Sasaran Monitoring dan Evaluasi adalah satuan kerja yang memperoleh anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 di 38 provinsi dan 23 UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2025

2.1. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada tahun 2025 Ditjen PKH menyepakati 9 (sembilan) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sebagai berikut: (1) Peningkatan Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, itik); (2) Peningkatan Jumlah Produksi Susu; (3) Peningkatan Jumlah Produksi Telur; (4) Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis; (6) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan; (10) Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (11) Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tersaji pada tabel 3

Tabel 3. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Ditjen PKH Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Komoditas Peternakan Dalam Negeri yang Tersedia	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	4,71	Juta Ton
		Jumlah Produksi Susu	0,84	Juta Ton
		Jumlah Produksi Telur	6,89	Juta Ton
2	Meningkatnya Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	89,50	%
3	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis	Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis	76,70	%
4	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,50	%
5	Termanfaatkannya Sarana Produksi	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	94,50	%

	Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan			
6	Meningkatnya Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan	95	%
7	Meningkatnya Komoditas Pertanian yang Berdaya Saing	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	%
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif dan Efisien	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	80	%
9	Terwujudnya Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	87,30	%

Sumber: Perjanjian Kinerja Ditjen PKH Tahun 2025

2.2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) atau Kegiatan Fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang sudah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu:

- 1) IKSK pada Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak;
- 2) IKSK pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
- 3) IKSK pada Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak;
- 4) IKSK pada Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 5) IKSK pada Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- 6) IKSK pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Tabel 4. Indikator Kegiatan Fungsi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

A. FUNGSI PAKAN			
No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terpenuhinya pakan hijauan		
	Peningkatan akumulasi produksi hijauan pakan berkualitas (Ton Segar)	%	877.250
2	Terpenuhinya pakan olahan sesuai kebutuhan		
	Jumlah pakan ternak sapi untuk produksi	Ton	5.508.427
	Jumlah pakan ternak ayam ras pedaging untuk produksi	Ton	11.254.672

A. FUNGSI PAKAN			
No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Jumlah pakan ternak itik untuk produksi	Ton	125.583
	Jumlah pakan ternak babi untuk produksi	Ton	445.898
3	Terpenuhinya pakan ternak perah sesuai kebutuhan		
	Jumlah pakan ternak perah untuk produksi susu (sapi perah)	Ton	610.126
4	Terpenuhinya pakan untuk ayam petelur sesuai dengan kebutuhan		
	Jumlah pakan ternak untuk ayam petelur	Ton	7.539.398
Rincian Output			
No	Rincian Output	Satuan	Target
1	Koordinasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan	kegiatan	5
2	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	NSPK	4
3	Penyidikan dan Pengujian Produk – Mutu dan Keamanan Pakan	Produk	3.887

B. FUNGSI KESEHATAN HEWAN			
No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya perlindungan hewan ternak dari PHMS		
	Persentase meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan/ternak pada Kab/Kota	%	80,50
2	Meningkatnya hewan yang memenuhi persyaratan kesehatan		
	Persentase jumlah hewan yang memenuhi persyaratan hewan terhadap total jumlah Kesehatan hewan keseluruhan hewan yang diajukan untuk dilalulintaskan	ekor	70.000
3	Meningkatnya unit usaha budidaya hewan yang memenuhi persyaratan teknis penerapan biosecurity		
	Peningkatan unit usaha hewan yang memenuhi persyaratan teknis penerapan biosecurity	unit	286
4	Meningkatnya ketersediaan obat hewan dan alat Kesehatan hewan		
	Persentase jumlah produk obat hewan dan alat Kesehatan hewan yang terintegrasi terhadap jumlah pengajuan registrasi produk obat hewan dan alat Kesehatan hewan	%	90,00
5	Meningkatnya kemampuan deteksi dan respon cepat kejadian penyakit hewan		
	Persentase penyakit hewan yang dideteksi dan direspon dengan cepat terhadap jumlah keseluruhan laporan penyakit hewan	%	80,00
6	Meningkatnya layanan kelembagaan dan sumber daya Kesehatan hewan guna mendukung Siskeswanas		
	Persentase jumlah layanan unit pelayanan Kesehatan hewan (UPKH) yang sesuai persyaratan dan laboratorium Kesehatan hewan sesuai persyaratan	%	59,00
7	Fasilitasi pemasukan ternak sapi perah dan sapi pedaging impor ke Indonesia melalui investasi		
	Jumlah pemasukan ternak sapi perah impor ke Indonesia melalui investasi	ekor	35.000
	Jumlah pemasukan ternak sapi pedaging impor ke Indonesia melalui investasi	ekor	35.000
Rincian Output			
No	Rincian Output	Satuan	Target
1	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan	kegiatan	6

B. FUNGSI KESEHATAN HEWAN			
No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	NSPK	7
3	Layanan Kesehatan Hewan	layanan	4.000.000
4	Sampel Penyakit Hewan yang Teramati dan Teridentifikasi	Sampel	68.733
5	Hasil Uji Mutu Obat Hewan	produk	2.500
6	Obat Hewan dan Bahan Biologik yang Diproduksi	produk	7.175.105
7	SBSN Sarana Biosecurity Center di Wilayah Timur Indonesia	unit	1
8	SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan, Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah	unit	1
9	SBSN Prasarana Biosecurity Center di Wilayah Timur Indonesia	unit	1
10	Prasarana Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia	unit	1
11	SBSN Prasarana Laboratorium Pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan, Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah	unit	1

C. FUNGSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK			
No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya mutu produk peternakan untuk komoditas ekspor		
	Persentase ekspor ternak yang diterima negara tujuan karena alasan mutu ternak terhadap total	%	100,00
2	Terpenuhinya populasi ternak sesuai kebutuhan produksi		
	Jumlah populasi ternak sapi siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	2.472.145
	Jumlah populasi ternak kerbau siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	104.515
	Jumlah populasi ternak kambing siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	4.171.957
	Jumlah populasi ternak domba siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	3.346.370
	Jumlah populasi ternak ayam sesuai kebutuhan produksi	Ekor	3.572.911.726
	Jumlah populasi ternak itik sesuai kebutuhan produksi	Ekor	33.048.273
	Jumlah populasi ternak babi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	2.029.864
3	Terpenuhinya bibit ternak sesuai kebutuhan		
	Jumlah bibit sapi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	2.036
	Jumlah bibit kerbau potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	66
	Jumlah bibit kambing potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	1.359
	Jumlah bibit ayam sesuai kebutuhan produksi	Ekor	784.665
	Jumlah bibit itik sesuai kebutuhan produksi	Ekor	1.000.000
	Jumlah bibit babi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	286
4	Tersedianya standar benih dan bibit ternak sesuai kebutuhan		
	Rasio standar benih ternak yang dihasilkan terhadap total standar benih ternak yang direncanakan	%	100,00
	Rasio standar bibit ternak yang dihasilkan terhadap total standar bibit ternak yang direncanakan	%	100,00
5	Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit bermutu		
	Rasio benih dan bibit yang bersertifikat terhadap total benih dan bibit yang diajukan	%	100,00

C. FUNGSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK			
6	Meningkatnya produksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein nasional		
	Produksi susu	Ton	808.352
	Jumlah betina laktasi ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu	Ekor	210.501
	Jumlah bibit sapi perah sesuai kebutuhan produksi	Ekor	1.200
7	Meningkatnya produksi telur untuk memenuhi kebutuhan protein nasional		
	Produksi telur	Ton	6.581.605
	Jumlah betina produktif ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur	Ekor	301.274.645
8	Tersedianya sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak		
	Tingkat pemanfaatan sarana perbibitan dan produksi ternak	%	100,00
Rincian Output			
		Satuan	Target
1	Persentase Ekspor Ternak yang Diterima Nrgara tujuan karena Alasan Mutu Ternak Terhadap Total Ekspor Ternak per Negara Tujuan (Alasan penolakan: Mutu Ternak)	%	100
2	Jumlah Populasi Ternak Sapi Siap Potong Sesuai kebutuhan Produksi	Ekor	2.472.145
	Jumlah Populasi Ternak Kerbau Siap Potong Sesuai kebutuhan Produksi	Ekor	104.515
	Jumlah Populasi Ternak Kambing Siap Potong Sesuai kebutuhan Produksi	Ekor	4.171.957
	Jumlah Populasi Ternak Domba Siap Potong Sesuai kebutuhan Produksi	Ekor	3.346.370
	Jumlah Populasi Ternak Ayam Siap Potong Sesuai kebutuhan Produksi	Ekor	3.572.911.726
	Jumlah Populasi Ternak Itik Siap Potong Sesuai kebutuhan Produksi	Ekor	33.048.273
	Jumlah Populasi Ternak Babi Siap Potong Sesuai kebutuhan Produksi		2.029.864
3	Jumlah Bibit Sapi Potong Sesuai Kebutuhan Produksi	Ekor	2.036
	Jumlah Bibit Kerbau Potong Sesuai Kebutuhan Produksi	Ekor	66
	Jumlah Bibit Kambing Potong Sesuai Kebutuhan Produksi	Ekor	1.359
	Jumlah Bibit Ayam Potong Sesuai Kebutuhan Produksi	Ekor	784.665
	Jumlah Bibit Itik Potong Sesuai Kebutuhan Produksi	Ekor	1.000.000
	Jumlah Bibit Babi Potong Sesuai Kebutuhan Produksi	Ekor	
4	Rasio Standar Benih Ternak yang Dihasilkan Terhadap Total Standar Benih Ternak yang Direncanakan	%	286
	Rasio Standar Bibit Ternak yang Dihasilkan Terhadap Total Standar Bibit Ternak yang Direncanakan	%	100
5	Rasio Benih dan Bibit yang Bersertifikat Terhadap Total Benih dan Bibit yang Diajukan	%	100
6	Produksi Susu	Ton	808.352
	Jumlah Betina Laktasi Ternak Perah sesuai Kebutuhan Produksi Susu	Ekor	210.501
	Jumlah Bibit Sapi Perah sesuai Kebutuhan Produksi	Ekor	170
7	Produksi Telur	Ton	6.581.605
	Jumlah Betina Produktif Ternak Ayam Ras Petelur sesuai Kebutuhan Produksi Telur	Ekor	301.274.645
8	Tingkat Pemanfaatan Sarana Perbibitan dan Produksi Ternak	%	100

D. FUNGSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pemenuhan persyaratan sanitary produk hewan pangan dan nonpangan yang diterima negara tujuan		
	Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan karena alasan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan	%	100,00
2	Tersedianya daging yang sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat		
	Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong	%	43,20
	Rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong	%	90,70
	Rasio penjaminan daging babi yang sehat, aman dan bermutu terhadap total ternak babi yang dipotong	%	23,90
3	Tersedianya produk susu dan telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu untuk konsumsi masyarakat		
	Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk susu yang dihasilkan	%	89,50
	Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan	%	96,90
4	Terjaminnya keamanan dan mutu panga nasal ternak		
	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	89,50
5	Tersedianya sarana prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner		
	Tingkat kemanfaatan sarana prasarana Kesehatan Masyarakat veteriner	%	96,70
6	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis		
	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis	%	76,70
7	Meningkatnya penerapan kesejahteraan hewan dalam penanganan hewan		
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan kesejahteraan hewan yang ditindaklanjuti	%	100,00
No	Rincian Output	Satuan	Target
1	Koordinasi		
	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kegiatan	1
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner	NSPK	10

E. FUNGSI KESEKRETARIATAN			
No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima		
	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	35,50
	Tingkat Kepuasan Unit Kerja Eselon II di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala Likert (1-4)	3

	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Level	4
	Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Terkait Ditjen PKH yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH	%	85,00
	Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit yang Diberikan Inspektorat Jenderal	%	90,00
	Indeks kepuasan Masyarakat atas Layanan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala Likert (1-4)	3,075
2	Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas		
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	90,85

No	Rincian Output	Satuan	Target
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	Layanan BMN	Layanan	240
	Layanan Hukum	Layanan	1
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1
	Layanan Umum	Layanan	28
	Layanan Data dan Informasi	Layanan	39
	Layanan Bantuan Hukum	Layanan	6
	Layanan Perkantoran	Layanan	45
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	Layanan Sarana Internal	Layanan	1
3	Layanan Manajemen SDM Internal		
	Layanan Manajemen SDM	Layanan	1.814
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	13
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	30
	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	722

F. FUNGSI HILIRISASI HASIL PETERNAKAN			
No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya daya saing komoditas hasil peternakan		
	Nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan	US\$ 000	1.290.007
	Pertumbuhan unit usaha peternakan	%	5,14
2	Meningkatnya nilai tambah komoditas peternakan		
	Tingkat kemanfaatan sapras pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	%	95,00
No	Rincian Output	Satuan	Target
1	Koordinasi		
	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kegiatan	4
2	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria		
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	NSPK	3
3	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		

	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Lembaga	4
--	--	---------	---

2.3. Indikator Kegiatan Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

Kegiatan Strategis pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu kegiatan yang memiliki proporsi anggaran besar, kegiatan secara rutin dipantau oleh Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan kegiatan yang mempengaruhi capaian program. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan pada Kegiatan Strategis yaitu:

a. Pengembangan Investasi dan Populasi Sapi Perah dan/atau Sapi Pedaging

Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Pertanian melakukan upaya peningkatan populasi sapi perah dan sapi potong dengan meningkatkan investasi oleh pihak swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan populasi ini ditargetkan dengan penambahan 200 ribu ekor sapi perah dan 200 ribu ekor sapi pedaging pada tahun 2025.

Untuk mendukung percepatan penyediaan daging dan susu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan membentuk Tim Pengembangan Investasi dan Populasi Sapi Perah dan/atau Sapi Pedaging berdasarkan Keputusan Nomor 3222/Kpts/OT.050/F/03/2025.

- Komitmen untuk sapi perah pada tahun 2025-2029 adalah 957.045 ekor dari 187 pelaku usaha dan untuk sapi pedaging adalah 537.460 ekor dari 81 pelaku usaha.
- Komitmen untuk sapi perah pada tahun 2025 adalah 80.394 ekor dari 187 pelaku usaha dan untuk sapi pedaging adalah 82.372 ekor dari 81 pelaku usaha.
- Realisasi pemasukan sampai dengan tanggal 25 April 2025 adalah sejumlah 4.404 ekor sapi perah dari 6 pelaku usaha dan 3.276 ekor sapi pedaging dari 16 pelaku usaha.

b. Pengembangan Ayam Ras Petelur (Ayam merah Putih)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor peternakan nasional melalui berbagai program pengembangan unggas dan aneka ternak. Program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta mendukung keberlanjutan industri peternakan di Indonesia. Pengembangan ternak unggas dan aneka ternak diberikan pada kelompok tani ternak selaku penerima bantuan. Pada tahun 2025 kegiatan pengembangan ternak unggas dan aneka ternak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian produksi pangan asal ternak di setiap desa dapat dilakukan introduksi skema klasterisasi peternakan di masing-masing desa terutama di daerah yang defisit produksi telur unggas melalui pemanfaatan pekarangan rumah tangga, sehingga hal ini dapat berkontribusi langsung terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 14 Satker Pelaksana Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan 1 OPD atau Dinas Daerah. Total alokasi kegiatan pengembangan ayam petelur untuk Satker UPT target 490.800 ekor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 163.436.400.000 sedangkan untuk satker OPD target pelaksanaan sebanyak 2.700 ekor dengan pagu sebesar Rp.899.100.000.

c. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Realisasi kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 80,62% diperoleh dari rata-rata angka kesehatan hewan dari 11 (sebelas) PHMS (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, ASF, LSD, PMK, Surra, SE, dan Jembrana) di kabupaten/kota. Realisasi ini berdasarkan capaian tahun 2024, dikarenakan pada triwulan I masih dalam tahap pelaksanaan program/kegiatan sedangkan penghitungan persentase wilayah yang terkendali dari PHMS baru dapat dihitung pada akhir tahun.

Sebagai upaya pengendalian dan langkah antisipasi kenaikan kasus PMK di Indonesia, telah dilaksanakan distribusi vaksin ke provinsi tertarget sebanyak 1.583.200 dosis dan hingga akhir Maret 2025 pelaksanaan vaksinasi dengan vaksin APBN sudah terealisasi sebanyak total vaksinasi sebanyak 1.118.061 dosis (70,62%) di 28 provinsi, 377 kab, 3.222 kecamatan, dan 11.030 desa.

Selain itu, telah diberikan bantuan obat-obatan, vitamin dan disinfektan ke wilayah prioritas yaitu Lampung, Pulau Jawa, Bali dan NTB dan beberapa provinsi lainnya. Total distribusi obat, vitamin dan disinfektan sebanyak 79.460 dosis (68,6%) dari total stok 115.900 dosis ke 17 Provinsi dan 1 UPT.

Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan distribusi vaksin sebanyak 4 juta dosis sepanjang tahun 2025. Vaksinasi akan dilakukan dalam dua periode, yaitu Januari-Maret dan Juli-September. Pelaksanaan vaksinasi akan difokuskan pada daerah dengan risiko tinggi berdasarkan pemetaan kasus, dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Prioritas 1: sapi perah dan radius 3 km dari lokasi kasus
- 2) Prioritas 2: UPT Perbibitan dan sekitarnya
- 3) Prioritas 3: peternakan rakyat dan ternak lainnya di sekitar peternakan sapi

Penyelenggaraan vaksinasi ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan hewan pemerintah, dokter hewan mandiri, asosiasi profesi (PDHI, ISPI,

PAVETI), hingga mahasiswa Kedokteran Hewan. Untuk memastikan efektivitas vaksinasi, pelaporan akan dilakukan melalui aplikasi iSIKHNAS, yang mencatat distribusi dan realisasi vaksin secara nasional.

Dengan strategi yang sistematis dan koordinasi lintas sektor, diharapkan Indonesia dapat mencapai nol kasus PMK pada peternakan skala besar dan komersial pada tahun 2029, serta mempertahankan status bebas PMK untuk jangka panjang. Program vaksinasi berkelanjutan hingga 2035 menjadi kunci utama dalam merealisasikan target ini.

d. Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

1) SBSN Balai Besar Veteriner Maros

- a. Pengadaan konsultan perencanaan telah dilaksanakan dan berakhir pada tanggal 3 Mei 2025
- b. Review KAK dan HPS konsultan pada tanggal 21-25 April 2025
- c. Review KAK dan HPS kontrak pada awal Mei 2025
- d. Rencana pengadaan alat laboratorium sebanyak 12 unit pada bulan April s.d Mei 2025

2) SBSN Balai Veteriner Bukittinggi

- a. Sudah melaksanakan kontrak
 - Jasa konsultan manajemen kontruksi selesai pada tanggal 5 Desember 2025
 - Jasa konsultan perencanaan selesai pada tanggal 8 Juni 2025
- b. Bulan Mei 2025 diharapkan kedua pekerjaan sudah selesai
- c. Realisasi akrual sampai bulan April 2025 sebesar 15% dari pagu sarana sebesar Rp.2.000.000.000,-

e. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Capaian Kumulatif s.d. April 2025

Untuk tahun 2025 belum ada target yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, namun realisasi KUR pada Triwulan I tahun 2025 untuk sektor pertanian mencapai 22,930 triliun rupiah dan realisasi KUR khusus untuk subsektor peternakan (tidak termasuk *mixed farming*) sebesar 3,592 triliun rupiah untuk 73.948 debitur.

Selain untuk usaha peternakan dimaksud, terdapat realisasi untuk kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan (atau mix-farming dimana minimal 60% dari akad kredit dimanfaatkan untuk usaha peternakan) sebesar 2,612 triliun rupiah untuk 64.701 debitur, sehingga total KUR untuk usaha peternakan

sebesar 6,205 triliun rupiah untuk 138.649 debitur. Secara rinci realisasi KUR Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Realisasi Penyaluran KUR Sektor Pertanian, 2025*)

No	Sektor	Target	Realisasi	%	Debitur
1	Tanaman Pangan	0	5,351,034,343,424	0,00	120,054
2	Hortikultura	0	2,085,200,660,089	0,00	46,513
3	Perkebunan	0	8,997,280,164,585	0,00	138,450
4	Peternakan	0	3,592,813,650,001	0,00	73,948
5	Kombinasi Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming)	0	2,612,509,600,010	0,00	64,701
6	Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	0	291,597,100,000	0,00	6,448
		0	22,930,435,518,109	0,00	450,114

*) Data sampai dengan tanggal 30 April 2025

Sumber : SIKP dan SAKURA Kementan

Realisasi penyaluran KUR dari tahun 2020 s.d. tahun 2024 mengalami peningkatan selanjutnya pada tahun 2023 mengalami penurunan, Dimana salah satu penyebabnya adanya perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman penyaluran KUR yang perlu waktu untuk sosialisasi dan penyesuaian pada sistem perbankan. Selanjutnya realisasi penyaluran KUR tahun 2025 s.d. 30 April 2025 (semester I) apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 telah mencapai 25,47%. Realisasi Penyaluran KUR tahunan pada periode 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. Penyaluran KUR Untuk Usaha Peternakan

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Realisasi KUR (Triliun)	13,75	15,54	21,36	20,76	24,36	6,205
Debitur	497.353	462.346	484.223	478.429	540.969	138.649

*) Data sampai dengan tanggal 30 April 2025

Sumber : SIKP dan SAKURA Kementan

Realisasi KUR subsektor peternakan didominasi untuk bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya kambing domba dan pembibitan dan budidaya unggas. Secara rinci nilai dan jumlah debitur KUR untuk masing-masing bidang usaha dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel Realisasi penyaluran KUR Subsektor Peternakan Per Komoditi, 2025*)

NO	KODE SEKTOR	KOMODITAS	REALISASI	DEBITUR
1	012110	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	1,673,534,550,000	36,296
2	012191	Pembibitan dan Budidaya Domba dan Kambing Potong	675,540,950,000	18,510
3	012192	Pembibitan dan Budidaya Ternak Perah	367,539,000,000	5,734
4	012210	Pembibitan dan Budidaya Babi	309,534,200,000	6,099
5	012291	Pembibitan dan Budidaya Unggas	566,664,950,001	7,309
Jumlah			3,592,813,650,001	73,948

*) Data sampai dengan tanggal 30 April 2025 - Sumber: SIKP, Sakura Kementan

f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan non Fisik

Kegiatan DAK Bidang Pertanian lingkup Ditjen PKH dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota terpilih untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai prioritas nasional.

Kegiatan DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik adalah salah satu jenis dana alokasi khusus yang merupakan bagian dari transfer ke daerah dan digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah.

Sedangkan DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Kegiatan DAK terdiri:

1. DAK Puskesmas

Seiring dengan perubahan lingkungan dan laju pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang semakin meningkat guna menghadapi tantangan di era informasi dan globalisasi ke depan yang lebih kompleks perlu diwujudkan status kesehatan hewan nasional yang optimal. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) terhadap penyakit hewan terutama PHMS lebih dititik-beratkan melalui metode partisipatif dan menggunakan epidemiologis terapan yang dilaksanakan secara terpadu dalam kerangka *One Health*.

Guna mengefektifkan perwujudan status kesehatan hewan yang optimal diperlukan pengembangan dan penguatan pelayanan kesehatan hewan berbasis kelembagaan Puskesmas yang tangguh yang tersebar di berbagai daerah.

Mengingat Puskesmas merupakan unit pelayanan teknis terdepan di bidang kesehatan hewan maka diberikan dana penguatan kelembagaan dan

operasional melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik. Tahun 2025, Puskesmas tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Sedangkan DAK Non Fisik pada Tahun 2025, jumlah lokus penerima sebanyak 264 Puskesmas tersebar di 17 Provinsi, 48 Kabupaten dengan *unit cost* sebesar Rp.194.400.000,- untuk Biaya Operasional Puskesmas meliputi pembelian obat hewan, pembelian bahan pendukung pengobatan, operasional pelaporan iSIKHNAS, operasional pelayanan kesehatan hewan, koordinasi, surveilans, pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium, dan bimtek/pelatihan pelayanan kesehatan hewan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel. Sebaran Alokasi DAK Non Fisik Tahun 2025

No	Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat Puskesmas
1	Provinsi Aceh	5
2	Provinsi Sumatera Utara	5
3	Provinsi Sumatera Barat	6
4	Provinsi Riau	11
5	Provinsi Sumatera Selatan	22
6	Provinsi Lampung	4
7	Provinsi Jawa Barat	17
8	Provinsi Jawa Tengah	44
9	Provinsi DI Yogyakarta	18
10	Provinsi Jawa Timur	37
11	Provinsi Nusa Tenggara Barat	28
12	Provinsi Nusa Tenggara Timur	32
13	Provinsi Kalimantan Tengah	3
14	Provinsi Sulawesi Selatan	3
15	Provinsi Sulawesi Tenggara	4
16	Provinsi Papua	7
17	Provinsi Papua Selatan	7
	Total	624

Fasilitasi dan pengembangan Puskesmas sebagai unit terkecil 22 pelayanan kesehatan hewan terus dilakukan, jumlah Puskesmas tahun 2025 (s.d. Maret 2025) sebanyak 1.801 unit Puskesmas yang tersebar di 470 kabupaten dan 38 provinsi, dengan dukungan SDM 2.021 dokter hewan dan 4.826 paramedik veteriner.

g. Capaian Implementasi RKA-KL

Realisasi Kinerja Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 11,21%

atau Rp.139,769 miliar dari total alokasi anggaran Ditjen PKH Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1,246 triliun.

2.4 Indikator Kinerja RKA-KL

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi RKA-K/L dilakukan terhadap capaian Rincian Output (RO) pada setiap kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran tahun 2025 yang diukur setiap bulan secara kumulatif melalui aplikasi SMART DJA dan e-Monev Bappenas. Mekanisme pemantauan capaian kinerja RO masing-masing kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran pada setiap satker kegiatan setiap bulan secara kumulatif pada aplikasi SMART DJA dan kinerja setiap komponen pada aplikasi e-Monev Bappenas dengan membandingkan realisasi dengan target kegiatan.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai 6 (enam) kegiatan fungsi, yaitu: (1) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak, (2) Peningkatan Produksi Pakan Ternak, (3) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, (4) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (5) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan (6) Program Dukungan Manajemen (mandatory). Setiap kegiatan utama terdiri dari beberapa indikator *output* yang selengkapnya disajikan pada Lampiran 1.

BAB III

CAPAIAN KINERJA DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TRIWULAN I TAHUN 2025

3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Ditjen PKH Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian IKU Ditjen PKH Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
SP1	Meningkatnya Komoditas Peternakan dalam Negeri yang Tersedia	1	Jumlah Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, dan Itik)	Juta Ton	4,71	1,68	35,67
		2	Jumlah Produksi Susu	Juta Ton	0,84	0,28	33,75
		3	Jumlah Produksi Telur	Juta Ton	6,46	2,32	36,01
SP2	Meningkatnya Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	4	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	%	89,50	-	-
SP3	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari <i>Zoonosis</i>	5	Persentase Wilayah yang Terkendali <i>Zoonosis</i>	%	76,70	-	-
SP4	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis	6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,50	80,62*	100,15
SP5	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan	7	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	94,50	-	-
SP6	Meningkatnya Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah	8	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	%	95,00	25,00	26,32

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
SP7	Meningkatnya Komoditas Pertanian yang Berdaya Saing	9	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	1,00	6,26	626	
SP8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif dan Efisien	10	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	80,00	20,00	25,00	
SP9	Terwujudnya Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	11	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	87,30	89,44	102,45	

3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang sudah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana pada Lampiran 1.

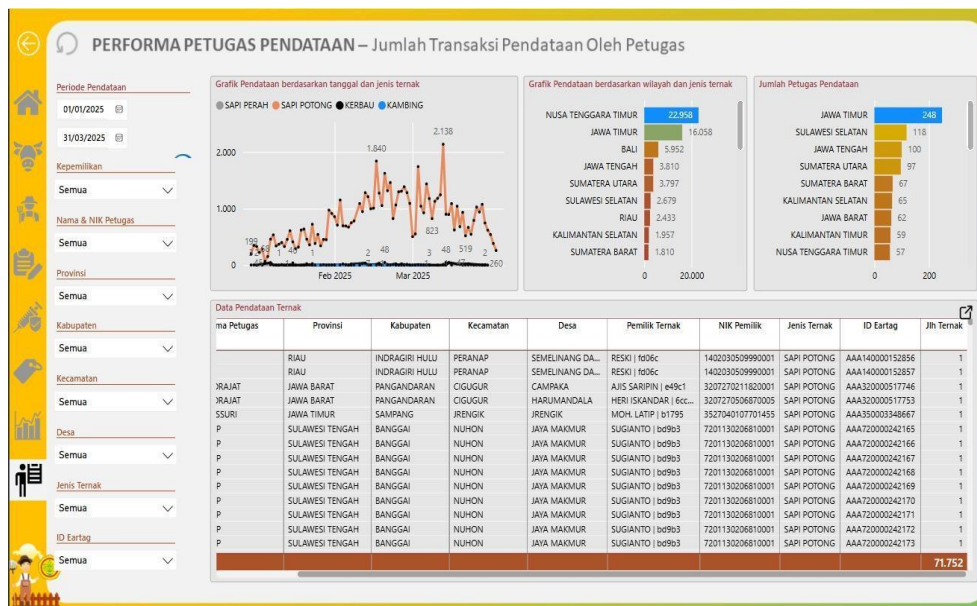
3.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Strategis

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan pada Kegiatan Strategis sebagai berikut:

3.3.1.1. Penandaan dan Pendataan Ternak

Untuk mengetahui populasi ternak yang telah, belum, dan tidak divaksinasi, dilakukan penandaan dan pendataan ternak di 23 provinsi sebagai bagian dari Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pelaksanaan Penandaan dan Pendataan Ternak di Triwulan I tahun 2025 realisasinya sebanyak 71.752 ekor. Di tahun 2025 tidak ada target pelaksanaan penandaan dan pendataan secara nasional.

Tabel 6. Realisasi Penandaan dan Pendataan Ternak per provinsi di Triwulan I Tahun 2025



3.3.1.2. Uji Zuriat

Uji Zuriat sapi perah merupakan salah satu upaya peningkatan mutu genetik sapi perah diantaranya melalui kegiatan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional yang dilakukan sejak tahun 2004. Uji Zuriat merupakan pengujian untuk mengetahui potensi genetik calon pejantan melalui produksi susu anak betinanya (daughter cow/DC) dan dilakukan untuk menghasilkan bibit pejantan unggul yang sudah beradaptasi dengan kondisi agroklimat di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan uji zuriat tahun 2025 dan 2026 merupakan titik kritis karena merupakan tahapan dalam perkawinan DC dan dilanjutkan dengan pengukuran produksi susu dari DC selama periode 10 bulan.

Tabel 7. Capaian Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Periode IV Triwulan I

No	Provinsi	CPU ALBA		CPU CONAN		CPU SAMSON		Total Kelahiran	
		DC	Non DC/Jantan	DC	Non DC/Jantan	DC	Non DC/Jantan	DC	Non DC/Jantan
1	Sumatera Barat	10	13	11	12	11	7	32	32
2	Lampung	5	4	7	9	8	8	20	21
3	Jawa Barat	127	141	71	55	77	96	275	292
4	Jawa Tengah	59	66	61	68	39	38	159	172
5	DI. Yogyakarta	12	18	14	16	19	21	45	55
6	Jawa Timur	175	236	206	331	178	208	559	775
	Jumlah	388	478	370	491	332	378	1,090	1,347

3.3.1.3. Produksi Bibit Ternak

Produksi bibit ternak unggul dilaksanakan oleh 8 (delapan) UPT bidang Perbibitan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu BPTU HPT Pelaihari, BPTU HPT Indrapuri, BPTU HPT Denpasar, BPTU HPT Siborongborong, BPTU HPT Padang Mangatas, BPTU HPT Sembawa, BBPTU HPT Baturraden dan BET Cipelang. Target produksi bibit UPT untuk sapi

potong, sapi perah, kerbau, kambing, ayam, itik dan babi tahun 2025 sebesar 1.790.372 ekor

Produksi Bibit UPT Triwulan I Tahun 2025

NO	UPT	Komoditas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	BPTU HPTPelaihari	Sapi	Ekor	42	30	71,43
		Kambing	Ekor	1.359	149	10,96
		Itik	Ekor	1.000.000	99.729	9,97
2	BPTU HPT Indrapuri	Sapi	Ekor	369	107	29,00
3	BPTU HPT Denpasar	Sapi	Ekor	558	164	29,39
4	BPTU HPT Siborongborong	Kerbau	Ekor	166	29	17,47
		Babi	Ekor	186	32	17,20
5	BPTU HPT Padang Mangatas	Sapi	Ekor	490	181	36,94
6	BPTU HPT Sembawa	Sapi	Ekor	497	312	62,78
		Ayam	Ekor	784.665	140.477	17,90
7	BBPTU HPT Baturraden	Sapi perah	Ekor	1.200	105	8,75
		Kambing perah	Ekor	780	40	5,13
8	BET Cipelang	Sapi	Ekor	60	6	10,00
Total				1.790.372	241.361	13,48

Realisasi bibit ternak unggul sampai Triwulan I 2025 (Januari-Maret) mencapai 241.361 ekor atau 13,48 % dari target tahunan sebesar 1.790.372 ekor.

Sedangkan realisasi bibit ternak berdasarkan komoditas yaitu : sapi potong 800 ekor (39,5%), sapi perah 105 ekor (8,75%), kerbau 29 ekor (17%), kambing potong 149 ekor (11%), kambing perah 40 ekor (5%), babi 32 ekor (17%), itik 99.729 ekor dan ayam 140.477 ekor. Rincian realisasi bibit ternak per komoditas seperti table berikut:

No	Komoditas	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	%
1	Sapi Potong	2.016	800	39,5
2	Sapi Perah	1.200	105	8,75
3	Kerbau	166	29	17
4	Kambing Potong	1.359	149	11
5	Kambing Perah	780	40	5
6	Babi	186	32	17
7	Itik	1.000.000	99.729	10
8	Ayam	784.665	140.477	18

3.3.1.4. Produksi Bibit Sapi Perah

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden memiliki tugas pokok untuk memproduksi bibit ternak ruminansia perah yang terdiri dari sapi perah dan kambing perah. Dalam memproduksi bibit ternak, Balai ini memiliki 3 farm sapi perah dan 1 farm kambing perah. Farm sapi perah terdiri dari farm Tegal Sari dan Limpakuwus sebagai farm produksi dan farm Manggala yang difungsikan sebagai farm rearing (pembesaran pedet), sedangkan farm kambing perah berlokasi di Farm Limpakuwus.

Target produksi bibit sapi perah dan kambing perah BBPTUHPT Baturraden meningkat dari tahun ke tahun. Standar produksi bibit sapi perah mengacu pada SNI 2735:2022 Bibit Sapi Perah Frisian Holstein Indonesia, sedangkan produksi kambing perah mengacu pada SNI 7352-4:2022 Bibit kambing – Bagian 4: Saanen Indonesia untuk kambing perah Saanen dan SNI 7352.1:2015 Bibit kambing – Bagian 1: Peranakan Etawah untuk kambing perah Peranakan Etawah.

Dinamika Populasi Sapi Perah

Uraian	POPULASI BALAI						Total
	Betina Dewasa	Jantan Dewasa	Betina Muda	Jantan Muda	Pedet betina	Pedet jantan	
Januari 2025	1.231	60	186	134	98	82	1.791
Februari 2025	1.218	59	186	138	116	96	1.813
Maret 2025	1.221	55	189	140	121	105	1.831

Dinamika Populasi Kambing Perah

No	Uraian	POPULASI BALAI						Total
		Betina Dewasa	Jantan Dewasa	Betina Muda	Jantan Muda	Cempe betina	Cempe jantan	
1	Januari 2025	299	84	32	31	56	64	566
2	Februari 2025	294	85	46	53	49	53	580
3	Maret 2025	295	85	58	72	41	48	599

3.3.1.5. Produksi dan Distribusi Semen Beku dan Embrio

Target produksi benih ternak (semen beku dan embrio) tahun 2025 sebanyak 6.400.800 dosis/embrio, capaian realisasi produksi per 31 Maret 2025 sebanyak 1.026.109 dosis/embrio (16,03%), yang terdiri atas BBIB Singosari sebanyak 645.104 dosis, BIB Lembang sebanyak 380.848 dosis, dan BET Cipelang sebanyak 157 embrio. Secara rinci target dan realisasi produksi tersaji pada Tabel berikut.

Tabel Target dan Realisasi Produksi Benih Ternak

Produksi Benih UPT	PK 2025		Persentase (%)
	Target (dosis/embrio)	Realisasi B01 (dosis/embrio)	
BBIB Singosari	3.500.000	645.104	18,43
BIB Lembang	2.900.000	380.848	13,13
BET Cipelang	800	157	19,63
Jumlah	6.400.800	1.026.109	16,03

Realisasi distribusi benih ternak per 31 Maret 2025 sebanyak 679.815 dosis/embrio atau 16,58% dari target 4.100.600 dosis/embrio, yang terdiri atas BBIB Singosari sebanyak 463.080 dosis, BIB Lembang sebanyak 216.695, dan BET Cipelang sebanyak 40 embrio. Secara rinci target dan realisasi distribusi tersaji pada Tabel berikut:

Tabel Target dan Realisasi Distribusi Benih Ternak

Distribusi benih	Target (dosis/embrio)	Realisasi B03 (dosis/embrio)	Persentase (%)
BBIB Singosari	2.500.000	463.080	18,52
BIB Lembang	1.600.000	216.695	13,54
BET Cipelang	600	40	6,67
Jumlah	4.100.600	679.815	16,58

3.3.1.6. Pengembangan Ayam Petelur

Dalam rangka mewujudkan kemandirian produksi pangan asal ternak di setiap desa dapat dilakukan introduksi skema klusterisasi peternakan di masing-masing desa terutama di daerah yang defisit produksi telur unggas melalui pemanfaatan pekarangan rumah tangga, sehingga hal ini dapat berkontribusi langsung terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 14 Satker Pelaksana Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan 1 OPD atau Dinas Daerah. Total alokasi kegiatan pengembangan ayam petelur untuk Satker UPT target 490.800 ekor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 163.436.400.000 sedangkan untuk satker OPD target pelaksanaan sebanyak 2.700 ekor dengan pagu sebesar Rp.899.100.000.

3.3.1.7. Penerbitan Sertifikasi Kesehatan Hewan, Izin dan Rekomendasi

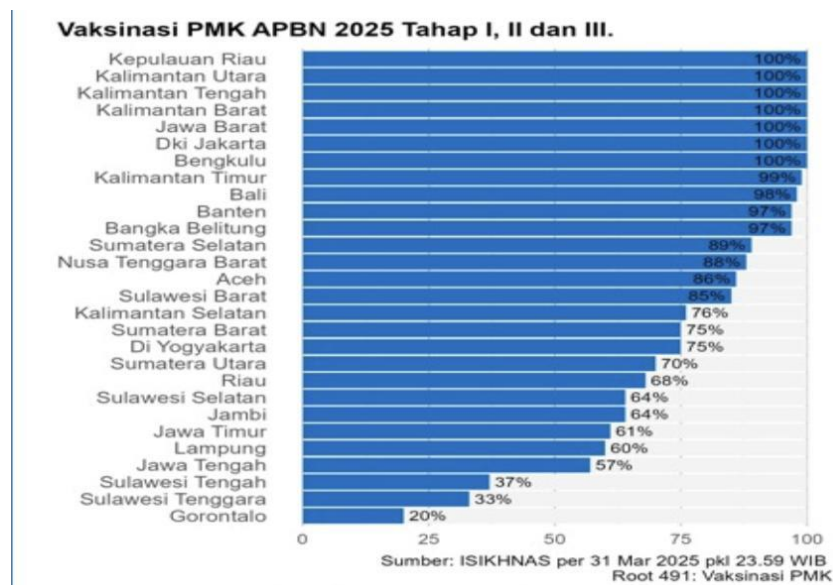
Capaian Penerbitan Sertifikasi Kesehatan Hewan, Izin, dan Rekomendasi pada Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 4. Penerbitan Sertifikasi Kesehatan Hewan, Izin, dan Rekomendasi
Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Komoditi Layanan	Jumlah Sertifikat Kesehatan Hewan/Izin/ Rekomendasi
1	Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio	6
2	Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah	5
3	Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong	12
4	Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak	23
5	Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan	1.163
6	Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa	587
7	Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar	24
8	Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF	11
9	Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa	93
10	Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak	40
11	Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan – <i>Hard Gelatine Capsugel</i>	4
	Total	1.968

3.3.1.8. Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

- a) Vaksin PMK bersumber dari DIPA Ditjen PKH T.A. 2025 telah didistribusikan sebanyak 1.583.200 dosis ke 28 provinsi dan 5 UPT Pusat. Realisasi 26esehat pelaksanaan vaksinasi hingga 31 Maret 2025 mencapai 1.118.525 dosis (70,65%). Selain itu, juga telah terlaksana vaksinasi hibah Kementerian Pertanian, mandiri (termasuk vaksinasi *feedloter* dan CSR), dan pemerintah daerah, sehingga realisasi vaksinasi secara keseluruhan mencapai 628.718 dosis. Data yang dilaporkan ke iSIKHNAS sebanyak 1.103.518 dosis (69,7%) di 28 Provinsi, 375 Kab/kota, 3.201 kecamatan, dan 10.945 desa, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik berikut



Grafik. Realisasi Vaksin PMK bersumber APBN TA 2025 Tahap I, II dan III

b) Realisasi Vaksinasi PMK bersumber Non APBN

Selain bersumber dari APBN, vaksinasi PMK juga menggunakan vaksin yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, vaksinasi mandiri oleh peternak, kegiatan CSR Perusahaan dan hibah Pemerintah.

Total realisasi vaksinasi sebanyak 628.718 dosis dengan rincian vaksinasi APBD 299.518 dosis (4 Provinsi), Hibah Kementan 49.188 dosis (8 Provinsi), Mandiri dan Feedloter 268.008 dosis (23 Provinsi), dan CSR 12.004 dosis (13 Provinsi), sebagaimana dapat dilihat pada Grafik berikut



Grafik. Realisasi Vaksin PMK bersumber Non APBN

3.3.1.9. Penyidikan dan pengujian Penyakit Hewan

Pada tahun 2025 telah melaksanakan Kegiatan Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan (11 UPT BBV/BV, BVF Pusvetma, BBPMSOH), dari target 18.945 sampel aktif, telah terealisasi sebanyak 2.515 (13,28%)

Rincian realisasi output kegiatan pengamatan penyakit hewan (sampel aktif) PMK Triwulan I Tahun 2025 per-UPT dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. Rincian Realisasi Output Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan (Sampel Aktif) PMK Triwulan I Tahun 2025 per UPT

Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Balai Besar Veteriner Maros	1.428	205	14,36
Balai Besar Veteriner Wates	2.863	13	0,45
Balai Besar Veteriner Denpasar	1.943	0	0
Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma	1.987	15	0,75
Balai Veteriner Banjarbaru	1.403	1.428	101,78
Balai Veteriner Bukittinggi	2.018	73	3,62
Balai Veteriner Jayapura	2.155	2	0,09
Balai Veteriner Lampung	1.780	142	7,98
Balai Veteriner Medan	1.593	576	36,16
Balai Veteriner Subang	1.075	61	5,67
BBPMSOH	700	0	0
Total	18.945	2.515	13,28

Sumber data: ivlab. Online

3.3.1.10. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Lingkup Ditjen PKH

Kegiatan DAK Bidang Pertanian lingkup Ditjen PKH dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota terpilih untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai prioritas nasional.

Kegiatan DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik adalah salah satu jenis dana alokasi khusus yang merupakan bagian dari transfer ke daerah dan digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah.

Sedangkan DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Kegiatan DAK terdiri:

a. Operasional Puskesmas

Seiring dengan perubahan lingkungan dan laju kesehatan peternakan dan kesehatan hewan yang semakin meningkat guna menghadapi tantangan di era informasi dan globalisasi ke depan yang lebih kompleks perlu diwujudkan status kesehatan hewan nasional yang optimal. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) terhadap penyakit hewan terutama PHMS lebih dititik-beratkan melalui metode partisipatif dan menggunakan epidemiologis terapan yang dilaksanakan secara terpadu dalam kerangka *One Health*.

Guna mengefektifkan perwujudan status kesehatan hewan yang optimal diperlukan pengembangan dan penguatan pelayanan kesehatan hewan berbasis kelembagaan Puskesmas yang tersebar di berbagai daerah.

Mengingat Puskesmas merupakan unit pelayanan teknis terdepan di bidang kesehatan hewan maka diberikan dana penguatan kelembagaan dan operasional melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik. Tahun 2025, Puskesmas tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Sedangkan DAK Non Fisik pada Tahun 2025, jumlah lokus penerima sebanyak 264 Puskesmas tersebar di 17 Provinsi, 48 Kabupaten dengan *unit cost* sebesar Rp.194.400.000,- untuk Biaya Operasional Puskesmas meliputi pembelian obat hewan, pembelian bahan pendukung pengobatan, operasional pelaporan iSIKHNAS, operasional pelayanan kesehatan hewan, koordinasi, surveilans, pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium, dan bimtek/pelatihan pelayanan kesehatan hewan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel Sebaran Alokasi DAK Fisik Tahun 2025

No	Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat Puskesmas
1	Provinsi Aceh	5
2	Provinsi Sumatera Utara	5
3	Provinsi Sumatera Barat	6
4	Provinsi Riau	11
5	Provinsi Sumatera Selatan	22
6	Provinsi Lampung	4
7	Provinsi Jawa Barat	17
8	Provinsi Jawa Tengah	44
9	Provinsi DI Yogyakarta	18
10	Provinsi Jawa Timur	37
11	Provinsi Nusa Tenggara Barat	28
12	Provinsi Nusa Tenggara Timur	32
13	Provinsi Kalimantan Tengah	3
14	Provinsi Sulawesi Selatan	3
15	Provinsi Sulawesi Tenggara	4
16	Provinsi Papua	7

17	Provinsi Papua Selatan	7
	Total	624

Penguatan kelembagaan veteriner di daerah terpusat di Puskesmas. Puskesmas merupakan pelaksana pelayanan kesehatan hewan di kesehatan lapangan yang langsung melakukan pelayanan kepada kesehatan berupa kesehatan pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi medik. Fasilitas dan pengembangan Puskesmas sebagai unit terkecil

pelayanan kesehatan hewan terus dilakukan, jumlah Puskesmas tahun 2025 (s.d. Maret 2025) sebanyak 1.801 unit Puskesmas yang tersebar di 470 kabupaten dan 38 provinsi, dengan dukungan SDM 2.021 dokter hewan dan 4.826 paramedik veteriner.

3.3.1.11. Rasio Ekspor Produk Hewan Pangan dan Nonpangan yang diterima Negara Tujuan

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyiapkan unit usaha produk hewan yang memiliki potensi untuk melaksanakan pengeluaran produk hewannya ke luar wilayah Indonesia. Untuk dapat memenuhi persyaratan teknis (sanitary) dari negara tujuan ekspor, maka dilaksanakan harmonisasi persyaratan teknis dengan unit usaha yang memiliki potensi ekspor tersebut. Selain peningkatan volume ekspor produk hewan, penambahan negara tujuan ekspor juga menjadi target dengan meningkatkan komoditas peternakan dalam negeri yang tersedia. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa unit usaha produk hewan Indonesia dapat diterima oleh negara-negara selain yang sudah menerima produk Indonesia.

Dalam kegiatan ini, target Capaian Indikator Kinerja Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang diterima kesehatan tujuan karena telah memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan adalah 100% yang artinya tidak boleh ada penolakan terhadap produk hewan yang diekspor oleh otoritas negara tujuan ekspor. Pada Triwulan I tahun 2025, rasio ekspor produk hewan pangan dan nonpangan yang diterima negara tujuan karena telah memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan mutu produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan adalah 100% dengan jumlah Veterinary Health Certificate (VHC) yang diterbitkan dalam rangka ekspor produk hewan ke negara tujuan sebanyak 1.639 sertifikat dan seluruhnya diterima di negara tujuan karena telah memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan mutu produk hewan yang ditetapkan oleh negara tujuan.

3.3.1.12. Rasio Penjaminan Daging Ruminansia yang Sehat, Aman dan Bermutu Terhadap Total Ternak Ruminansia yang Dipotong

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 juncto Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwam pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan Masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Persyaratan tersebut harus dipenuhi dalam rangka menjamin karkas, daging dan jeroan yang aman dan layak untuk dikonsumsi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk dapat menghasilkan daging yang aman dan layak untuk dikonsumsi maka proses produksi daging di RPH harus memenuhi persyaratan teknis baik fisik (bangunan dan peralatan), sumber daya manusia serta prosedur teknis pelaksanaannya. Pemenuhan persyaratan teknis tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya NKV sebagai bukti penjaminan dari Pemerintah sehingga produk hewan khususnya daging yang dihasilkan aman, sehat, dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Saat ini jumlah RPH Ruminansia (RPHR) yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 588, namun yang telah memiliki NKV sebanyak 187 RPH-R dan masih beroperasi, sehingga masih perlu dilakukan pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan. Data pemotongan RPH Ruminansia di RPH ber-NKV dan total pemotongan ruminansia. Realisasi rasio daging ruminansia yang sehat, aman dan bermutu dikonsumsi terhadap **total ternak ruminansia yang dipotong triwulan I tahun 2025 adalah 44,52%**. Apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 sebanyak 43,2% maka capaian kinerja Triwulan I sebesar 103,05%.

Jumlah daging ruminansia diperoleh dari jumlah ternak yang dipotong dengan nilai konversi dari satu ekor menjadi daging. Konversi satu ekor ternak sapi menjadi daging adalah 140,97 kg, sedangkan satu ekor kerbau adalah 129,72 kg, sehingga jumlah daging ruminansia adalah sebagai berikut:

Total Pemotongan Ternak Ruminansia di RPH-R Ber-NKV

Total Pemotongan Ternak Ruminansia di RPHR Ber-NKV			
Jenis hewan	Jumlah Pemotongan	Konversi menjadi Daging	Jumlah Daging (Kg)
Sapi	73.233	140,97	10.323.656,01
Kerbau	688	129,72	89.247,36
Total			10.412.903,37

Total Pemotongan Ternak Ruminansia di Seluruh Indonesia

Total Pemotongan Ternak Ruminansia di Seluruh Indonesia			
Jenis hewan	Jumlah Pemotongan	Konversi menjadi Daging	Jumlah Daging (Kg)
Sapi	159.100	140,97	22.428.327
Kerbau	7.399	129,72	959.798,28
Total			23.388.125,28

3.3.1.13. Rasio Penjaminan Daging Unggas yang Sehat, Aman dan Bermutu terhadap Total Ternak Unggas yang Dipotong

Untuk dapat menghasilkan daging yang aman dan layak dikonsumsi maka proses produksi daging di RPH harus memenuhi persyaratan teknis baik fisik (bangunan dan peralatan), sumber daya manusia serta prosedur teknis pelaksanaannya. Pemenuhan persyaratan teknis tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya NKV sebagai bukti penjaminan dari Pemerintah sehingga produk hewan khususnya daging yang dihasilkan aman, sehat, dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Saat ini jumlah RPH Unggas (RPHU) yang tersebar diseluruh Indonesia berjumlah 383, namun yang telah memiliki NKV sebanyak 247 RPHU sehingga masih perlu dilakukan pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan. Realisasi rasio daging unggas yang sehat, aman dan bermutu dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong Triwulan I tahun 2025 adalah 94,34%. Apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 sebanyak 90,7% maka didapatkan capaian sebesar 104,01%.

Perhitungan rasio ini berdasarkan perbandingan antara jumlah daging yang dihasilkan oleh RPHU ber-NKV dengan jumlah total daging yang dihasilkan dari pemotongan ternak unggas di seluruh Indonesia. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah daging unggas di RPH-U ber-NKV} \times 100\%}{\text{Jumlah daging unggas}}$$

Total Pemotongan Ternak Unggas di Seluruh Indonesia

Total Pemotongan Ternak Unggas di Seluruh Indonesia			
Jenis hewan	Jumlah Pemotongan	Konversi menjadi Daging	Jumlah Daging (Kg)
Sapi	159.100	140,97	22.428.327
Kerbau	7.399	129,72	959.798,28
Total			23.388.125,28

Jumlah daging unggas didapatkan dari jumlah ternak yang dipotong dikalikan dengan nilai konversi dari satu ekor menjadi daging. Konversi satu ekor unggas menjadi daging adalah 1,1 kg, sehingga perhitungan rasio daging yang aman, sehat dan bermutu adalah 94,34%.

3.3.1.14. Produk Telur yang berstatus Sehat, Aman dan Bermutu Terhadap Total Produk Telur yang dihasilkan

Perhitungan indikator dilakukan melalui analisa sampel layanan pengujian keamanan produk telur pada tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan penerimaan sampel pasif yang diuji oleh UPT Pusat (Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner, dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan). Hal ini dikarenakan pada tahun 2025, tidak dialokasikan anggaran untuk monitoring dan surveilans keamanan produk hewan di UPT termasuk untuk produk telur, sehingga perhitungan hasil hanya berdasarkan sampel yang dikirimkan oleh unit usaha untuk permintaan pengujian.

Jumlah Sampel Telur yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan

	Σ Sampel yang Ditolak	Σ Sampel	Sampel yang Ditolak (%)	Sampel yang Memenuhi (%)
Telur	13	1.097	1	99

Cara perhitungan rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan diperoleh dengan rumus berikut:

$$\frac{\Sigma \text{total sampel produk telur yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan}}{\text{total sampel produk telur dari layanan pengujian UPT (sampel pasif)}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka didapatkan capaian rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan pada periode triwulan I sebesar 99%. Peningkatan ini dapat terjadi dengan usaha dari berbagai sektor baik dari Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan ke unit usaha dalam peningkatan higiene sanitasinya. Capaian rasio produk telur yang berstatus

sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan masih melebihi target 2024.

3.3.1.15. Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan

Realisasi fisik Triwulan I diambil dari sampel yang diuji dari 10 UPT Ditjen PKH. Sampel ini merupakan sampel pasif untuk persyaratan registrasi produk hewan dan lalu lintas produk hewan. Setiap unit usaha yang melaksanakan lalu lintas dan registrasi produk hewan telah menerapkan higiene sanitasi dengan baik, yang telah memperoleh sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner)

Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan

	Σ Sampel yang Ditolak	Σ Sampel	Sampel yang Ditolak (%)	Sampel yang Memenuhi (%)
Daging	74	3.108	2	98
Susu	2	30	7	93
Telur	13	1.097	1	99
Total	89	4.235	2	98

Berdasarkan data pada tabel di atas, apabila dibandingkan dengan target Triwulan I tahun 2025 sebanyak 90,1% maka didapatkan capaian sebesar 108,77%. Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha produk hewan. Pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam Upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan.

3.3.1.16. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Zoonosis

Sehubungan dengan upaya pencegahan dan pengendalian zoonosis, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas. Penentuan zoonosis prioritas yang perlu ditangani dan dikendalikan dilakukan menggunakan One Health Zoonotic Disease Prioritization Tool (OHZDP) Tool, seperti dijelaskan oleh Rist et al. (2014). Metode ini memadukan pendekatan kualitatif dan semikuantitatif dengan melibatkan partisipan dari sektor kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, perguruan tinggi, serta komisi ahli kesehatan hewan.

Berdasarkan urgensi dan keterkaitan anggaran, ditetapkan rabies dan antraks menjadi prioritas bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Indikator keberhasilan kegiatan pencegahan dan pengendalian

zoonosis Adalah persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis. Wilayah terkendali Adalah provinsi yang tidak terjadi kasus zoonosis atau mengalami penurunan kasus zoonosis pada manusia.

Kasus Rabies dan Anthraks Tahun 2024 dan 2025

No	Provinsi	Kasus Rabies Triwulan I			Kasus Anthraks Triwulan I		
		2024	2025	Status	2024	2025	Status
1	Aceh	0	1	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
2	Bali	0	6	Terkendali	0	0	Terkendali
3	Bangka Belitung	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
4	Banten	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
5	Bengkulu	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
6	DI Yogyakarta	0	0	Terkendali	45	4	Terkendali
7	DKI Jakarta	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
8	Gorontalo	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
9	Jambi	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
10	Jawa Barat	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
11	Jawa Tengah	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
12	Jawa Timur	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
13	Kalimantan Barat	0	5	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
14	Kalimantan Selatan	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
15	Klaimantan Tengah	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
16	Kalimantan Timur	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
17	Kalimantan Utara	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
18	Kepulauan Riau	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
19	Lampung	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
20	Maluku	0	7	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali

21	Maluku Utara	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
22	Nusa Tenggara Barat	1	3	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
23	Nusa Tenggara Timur	8	9	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
24	Papua	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
25	Papua Barat	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
26	Papua Barat Daya	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
27	Papua Pegunungan	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
28	Papua Tengah	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
29	Papua Selatan	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
30	Riau	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
31	Sulawesi Barat	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
32	Sulawesi Selatan	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
33	Sulawesi Tengah	1	2	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
34	Sulawesi Tenggara	0	0	Terkendali	0	0	Terkendali
35	Sulawesi Utara	0	5	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
36	Sumatera Barat	0	2	Tidak Terkendali	0	0	Terkendali
37	Sumatera Selatan	3	2	Terkendali	0	0	Terkendali
38	Sumatera Utara	4	4	Terkendali	0	0	Terkendali
Jumlah		17	46		45	4	

Data kasus zoonosis triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan kasus zoonosis triwulan I tahun 2024 secara nasional. Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis Triwulan 1 Tahun 2025 adalah 89,47% yang meliputi jumlah wilayah terkendali rabies 78,95% dan antraks 100%. Capaian persentase tersebut masih di atas target capaian tahun 2025 yaitu 76,7%.

3.3.1.17. Investasi Sub Sektor Peternakan

Perkembangan investasi subsektor peternakan dapat dilihat dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

1) Capaian Output Triwulan I Tahun 2025

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum merilis laporan realisasi investasi Triwulan I Tahun 2025, hal ini menyebabkan data laporan realisasi investasi subsektor peternakan Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dilaporkan.

2) Pengembangan Investasi dan Populasi Sapi Perah dan/atau Sapi Pedaging

Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Pertanian melakukan upaya peningkatan populasi sapi perah dan sapi potong dengan meningkatkan investasi oleh pihak swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan populasi ini ditargetkan dengan penambahan 200 ribu ekor sapi perah dan 200 ribu ekor sapi pedaging pada tahun 2025.

Untuk mendukung percepatan penyediaan daging dan susu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan membentuk Tim Pengembangan Investasi dan Populasi Sapi Perah dan/atau Sapi Pedaging berdasarkan Keputusan Nomor 3222/Kpts/OT.050/F/03/2025.

Target penambahan populasi sapi perah dan sapi pedaging tahun 2025 adalah sebanyak 200 ribu ekor sapi perah dan 200 ribu ekor sapi pedaging, dan Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan mendapat amanat sebanyak 50 ribu ekor. Perkembangan investasi sapi perah dan sapi pedaging oleh pelaku usaha pada Triwulan I Tahun 2025:

- Komitmen untuk sapi perah pada tahun 2025-2029 adalah 957.045 ekor dari 187 pelaku usaha dan untuk sapi pedaging adalah 537.460 ekor dari 81 pelaku usaha.
- Komitmen untuk sapi perah pada tahun 2025 adalah 80.394 ekor dari 187 pelaku usaha dan untuk sapi pedaging adalah 82.372 ekor dari 81 pelaku usaha.
- Realisasi pemasukan sampai dengan tanggal 25 April 2025 adalah sejumlah 4.404 ekor sapi perah dari 6 pelaku usaha dan 3.276 ekor sapi pedaging dari 16 pelaku usaha.
- Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan memiliki tanggung jawab dalam pendamping ke pelaku usaha peternakan yang telah menyampaikan komitmen adalah sebanyak 33 perusahaan sapi perah dan 7 perusahaan.

3.3.1.18. Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan

Meningkatnya daya saing komoditas pertanian merupakan salah satu program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sasaran program ini indikator kinerjanya diukur dari pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya ekspor, merupakan indikasi kualitas produk peternakan dapat berdaya saing dan mengisi pangsa pasar luar negeri yang merupakan hasil seluruh kinerja fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang sekaligus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi *)
Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	1	6,26

Ket : *) Angka Tetap Februari 2025

Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan perbandingan realisasi pertumbuhan nilai ekspor terhadap target tahun 2025. Target Pertumbuhan Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 sebesar 1% dan realisasi berdasarkan angka tetap Februari 2025 adalah 6,26%.

Secara umum Pertumbuhan Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, hal ini disebabkan karena peningkatan ekspor signifikan untuk komoditas kuda, keledai, unggas, madu, lemak, telur tetas dan obat hewan. Disamping itu, beberapa komoditas juga menunjukkan penurunan nilai ekspor namun tidak begitu signifikan, komoditas tersebut diantaranya sarang burung walet, tulang dan tanduk, pakan hewan, yoghurt dan binatang hidup lainnya.

Gambar. Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2024 - 2025



Sumber: BPS dan Pusdatin, diolah oleh Dit. Hilirisasi Hasil Peternakan, 2025
) *Angka Tetap Februari 2025*

Ekspor produk peternakan Indonesia terus menunjukkan tren positif di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif. Selama periode Januari hingga Februari 2025, volume ekspor mencapai 83.224 ton, mengalami peningkatan sebesar 5,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai ekspor pun turut tumbuh menjadi USD 238,4 juta, naik 6,26% secara tahunan (*year-on-year*). Capaian ini menjadi indikasi bahwa subsektor peternakan Indonesia tidak hanya mampu menjaga kapasitas produksinya, tetapi juga berhasil meningkatkan daya saing produk di pasar internasional.

3.3.1.19. Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah: Fasilitas sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan T-1 (tahun 2024) berjumlah 59 unit yang terdiri dari 30 unit sarana dan 29 unit prasarana. Data didapatkan berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh Pembina Daerah dan kelompok penerima. Jenis sarana prasarana alokasi tahun 2024

Tabel. Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2024

KODE	RO/KOMPONEN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
RAG.001	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	30	30	100
101	Sarana Pengolahan Daging	Unit	2	2	100

102	Sarana Pengolahan Telur	Unit	2	2	100
103	Sarana Pengolahan Susu	Unit	2	2	100
104	Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	Unit	14	14	100
107	Sarana Pasar Ternak	Unit	3	3	100
108	Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	Unit	1	1	100
109	Sarana Tata Niaga	Unit	2	2	100
110	Sarana Pascapanen Hasil Ternak	Unit	4	4	100
RBK.001	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	29	29	100
101	Prasarana Pengolahan Daging	Unit	2	2	100
102	Prasarana Pengolahan Telur	Unit	2	2	100
103	Prasarana Pengolahan Susu	Unit	1	1	100
104	Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	Unit	14	14	100
107	Prasarana Pasar Ternak	Unit	3	3	100
108	Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	Unit	1	1	100
109	Prasarana Tata Niaga	Unit	2	2	100
110	Prasarana Pascapanen Hasil Ternak	Unit	4	4	100
	Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	59	59	100

Sumber : Data Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan, 2025

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dari 59 unit sarana prasarana pengolahan pemasaran hasil peternakan, ditargetkan 15 unit untuk dilakukan pemantauan, dan dari hasil pemantauan 15 unit sarana dan prasarana sudah termanfaatkan sehingga bisa meningkatkan nilai tambah produk dan peningkatan daya saing, khususnya untuk pupuk organik dengan diperolehnya izin edar dan sertifikat maka produk pupuk organik padat dan pupuk organik cair akan berdaya saing dengan produk-produk sejenis yang belum memiliki izin edar/sertifikat.

Tabel. Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Triwulan I Tahun 2025

Kode	RO/Komponen	Jumlah yg Disalurkan (Unit)	Jumlah Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
RAG.001	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	30	8	26,67
101	Sarana Pengolahan Daging	2	-	-
102	Sarana Pengolahan Telur	2	1	50,00
103	Sarana Pengolahan Susu	2	1	50,00
104	Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	14	6	42,86
107	Sarana Pasar Ternak	3	-	-
108	Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	1	-	-

109	Sarana Tata Niaga	2	-	-
110	Sarana Pascapanen Hasil Ternak	4	-	-
RBK.001	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	29	7	24,14
101	Prasarana Pengolahan Daging	2	-	-
102	Prasarana Pengolahan Telur	2	1	50,00
103	Prasarana Pengolahan Susu	1	-	-
104	Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	14	6	42,86
107	Prasarana Pasar Ternak	3	-	-
108	Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	1	-	-
109	Prasarana Tata Niaga	2	-	-
110	Prasarana Pascapanen Hasil Ternak	4	-	-
	Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	59	15	25,42

Sumber: Data Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan, 2025

3.3.1.20. Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan

Pertumbuhan unit usaha peternakan adalah jumlah usaha peternakan baru dibagi jumlah usaha peternakan yang dibina pada tahun lalu yaitu tahun 2025. Usaha peternakan baru merupakan usaha baru dan perluasan realisasi PMA dan PMDN pada tahun berjalan dengan sumber data BKPM yang dikoordinasikan oleh Pusdatin Kementan, sedangkan pelaku usaha yang dibina merupakan jumlah pelaku usaha yang dibina dengan pembinaan dan pengawasan kemitraan, penguatan kelembagaan, pengembangan korporasi peternak, dan pengembangan usaha lainnya pada tahun sebelumnya. Target pertumbuhan unit usaha peternakan pada tahun 2025 adalah 5,14%.

Realisasi Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan (%) Triwulan I tahun 2025 mencapai 1,11 % (2 unit unit usaha yang tumbuh dibagi dengan 180 unit usaha berkembang tahun 2024 dikalikan 100%), atau mencapai 162,60 % dari target yang ditetapkan pada Triwulan I.

Realisasi tersebut didapat dari jumlah usaha bidang peternakan yang tumbuh dan berkembang pada triwulan I 2025 sebanyak 37 unit dari target. 36,23 unit dimaksud terdiri atas 2 unit usaha bidang peternakan yang tumbuh dan 35 unit usaha peternakan yang dibina.

Tabel. Capaian Kinerja Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan Triwulan I 2025

No	Uraian	Satuan	Target					Realisasi			
		%	2025	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	%	Tahunan	%
1	Pertumbuhan Unit Usaha Peternakan	%	5.14	0.68	1.71	3.42	5.14	1.11	162.60	1.11	21.62
	Jumlah usaha yang tumbuh dan berkembang	Unit	189.25	36.23	46.85	53.07	53.1	37	102.13	37	19.55
	a. Jumlah usaha yang tumbuh	Unit	9.25	1.23	1.85	3.07	3.1	2	162.6	2	21.62
	b. Jumlah usaha yang dibina	Unit	180	35	45	50	50	35	100	35	19.44

Catatan: Jumlah usaha peternakan yang berkembang tahun 2024 sebesar 180 unit

3.3.1.21. Lembaga yang Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan Ekspor

Kegiatan yang dilaksanakan di Rincian Output (RO) Lembaga yang Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan Ekspor tahun 2025 hanya untuk memfasilitasi pemanfaatan kapal ternak untuk provinsi NTB, NTT dan Gorontalo, namun masih ada kegiatan lain yang terus dipantau antara lain:

1) Koordinasi Pemanfaatan Kapal Ternak

Kapal khusus angkutan ternak merupakan perwujudan tol laut yang bertujuan untuk menjamin kelancaran distribusi ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 hingga sekarang dan telah tersedia 6 (enam) buah armada kapal Camara Nusantara.

Daerah yang menjadi pangkalan trayek kapal khusus angkutan ternak adalah Provinsi NTT, NTB dan Gorontalo, sementara daerah penerima ternak diantara DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Hingga 30 April 2025, Kapal Camara Nusantara telah mengangkut sebanyak 11.206 ekor ternak sapi dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen dengan *loading factor* 88%. Mayoritas daerah tujuan kapal ternak yakni wilayah Kalimantan (Samarinda, Balikpapan dan Banjarmasin). Menurunnya permintaan ternak hidup dari NTT di wilayah Jabodetabek menyebabkan kerap dilakukan pengalihan trayek (deviasi) sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan muatan kapal khusus angkutan ternak. Meski begitu pemuatan ke Jabodetabek melalui Pelabuhan Tanjung Priok masih ada namun jumlah muatannya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya

2) Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Peternak

Pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan pada tahun 2024 dialokasikan di 18 (delapan belas) Kawasan di 12 (lima belas) Provinsi, yaitu Aceh (Aceh Besar), Sumatera Selatan (Banyuasin), Sumatera Barat (Solok Selatan), Bengkulu (Bengkulu Utara), Lampung (Lampung Selatan), Jawa Barat (Subang dan Cianjur), Jawa Timur (Probolinggo dan Kediri), Jawa Tengah (Banyumas dan Boyolali), Sulawesi Selatan (Gowa dan Sidrap), Sulawesi Tengah (Morowali), Kalimantan Timur (Penanjam Pasar Utara), Nusa Tenggara Barat (Lombok Timur, Lombok Tengah dan Sumbawa).

Pada triwulan I tahun 2025 anggaran untuk pembinaan pengembangan kawasan korporasi peternakan yang dialokasikan di pusat masih dalam diblokir. Pembinaan pada triwulan I telah dilaksanakan di korporasi provinsi Jawa Timur kabupaten Kediri pada tanggal 22-25 April 2025. Kendala dan permasalahan dalam pada umumnya kegiatan pengembangan kawasan korporasi peternakan belum optimalnya kelembagaan yang terbentuk dan tidak berperannya koperasi sebagai pusat manajemen bisnis dan kelembagaan korporasi yang disebabkan oleh pengelolaan asset masih berada di masing-masing kelompok, bisnis plan belum menjadi acuan dan bahkan cenderung sulit untuk diterapkan.

3) Pembinaan dan Koordinasi Kemitraan Usaha Peternakan

Kegiatan pembinaan dan koordinasi kemitraan usaha peternakan pada tahun 2025 tidak dialokasikan di provinsi dan anggaran yang dialokasikan di pusat masih dalam pemblokiran. Kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I adalah:

- Koordinasi dengan KPPU dan PT. MSP beserta Peternak mitra dalam rangka penyelesaian permasalahan kemitraan PT. MSP dengan peternak mitra pada tanggal 4 dan 6 Maret 2025.
- Sosialisasi skema kemitraan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025 yang mengundang pelaku usaha yang akan melakukan kemitraan beserta mitra.

Permasalahan pada umumnya adalah belum pahamnya mengenai kemitraan untuk pelaku usaha yang akan melakukan investasi dan belum sesuai perjanjian dan pelaksanaan kemitraan dengan regulasi kemitraan usaha peternakan. Tindak lanjut yang perlu dilakukan, antara lain Sosialisasi Permentan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan dan pelaksanaannya kepada pelaku usaha.

3.3.1.22. Terpenuhi Pakan Hijauan

Pemberian pakan ternak secara tepat dan berkualitas dapat meningkatkan potensi keunggulan genetik sapi peliharaan sehingga dapat meningkatkan hasil produksi ternak sesuai target. Untuk itu faktor utama yang menentukan keberhasilan budidaya ternak terutama ruminansia adalah pakan, karena pakan memberikan pengaruh besar dalam biaya produksi ternak dan berpengaruh langsung terhadap produksi, produktivitas dan kesehatan ternak. Hijauan pakan ternak dapat berasal dari rumput, leguminosa, tanaman pertanian seperti jagung yang dipanen untuk pakan atau dari hasil samping pertanian/perkebunan dan limbah agroindustri seperti limbah perkebunan sawit, kulit coklat, dan lain-lain. Capaian target Triwulan I dihitung dari produksi hijauan dari potensi jerami yang dimanfaatkan sebagai hijauan sebesar 49.728 ton, supply padang rumput sensus 2023 dengan pemanfaatan produksi sebesar 128.196 ton, pemanfaatan jagung yang dipanen hijauan dengan produksi 12.659 ton dan tanaman jagung muda sebanyak 33.782 ton, dengan total produksi 224.365 ton atau 102.33 % dari target sebesar 219.313 ton.

3.4. Capaian Indikator Kinerja Implementasi RKA-KL

Realisasi anggaran per Jenis Kewenangan dan per Kegiatan Utama sebagaimana Tabel 4 dan 5. Pada tahun 2025, penyerapan anggaran Ditjen PKH sebesar Rp.130.774.927.954,- atau setara dengan 10,49% terhadap total pagu anggaran akhir sebesar Rp.1.246.791.406.000,-. Jika tanpa memperhitungkan blokir anggaran, pagu anggaran pasca blokir sebesar Rp.227.100.590.000,- sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 57,58%. Dari total pagu anggaran yang dialokasikan untuk 6 (enam) kegiatan, proporsi anggaran terbesar dialokasikan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan, karena kegiatan tersebut mencakup kegiatan belanja pegawai, belanja operasional, dan layanan minimal UPT.

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yaitu (i) Belanja Pegawai sebesar Rp.48,693 miliar atau 35,01% dari pagu anggaran Rp.139,097miliar; (ii) Belanja Barang sebesar Rp.128,468 miliar atau 15,30% dari pagu anggaran Rp.839,797 miliar; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp.5,091 miliar juta atau 1,90% dari pagu Rp.267,897 miliar.

Tabel 4. Realisasi Anggaran per Jenis Kewenangan

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
SERAPAN ANGGARAN NASIONAL TA 2025 PER – 04 Mei 2025
(dalam ribuan)

NO	PROGRAM	PAGU	BLOKIR	REALISASI	% DENGAN BLOKIR	% (TANPA BLOKIR)	REALISASI AKRUAL SP2D + OS.KONTRAK	% AKRUAL DENGAN BLOKIR	% ACR (TANPA BLOKIR)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	4.500.000	2.266.660	622.501	13,83%	27,87%	622.501	13,83%	27,87%
2	Program Dukungan Manajemen	480.711.989	17.142.844	126.991.823	26,42%	27,39%	169.951.257	35,35%	36,66%
3	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	761.579.417	207.691.086	73.943.048	9,71%	13,35%	121.157.944	15,91%	21,87%
TOTAL		1.246.791.406	227.100.590	201.557.371	16,17%	19,77%	291.731.702	23,40%	28,61%

NO	JENI BELANJA	PAGU	BLOKIR	REALISASI SP2D	% SP2D	% SP2D (TANPA BLOKIR)	REALISASI AKRUAL	% ACR	% ACR (TANPA BLOKIR)
1	PEGAWAI	139.097.282	-	48.692.958	35,01%	35,01%	48.692.958	35,01%	35,01%
2	BARANG	839.796.881	217.761.063	128.467.725	15,30%	20,65%	214.682.650	25,56%	34,51%
3	MODAL	267.897.243	9.339.527	5.091.319	1,90%	1,97%	11.993.733	4,48%	4,64%
TOTAL		1.246.791.406	227.100.590	182.252.002	14,62%	17,87%	275.369.341	22,09%	27,01%

NO	KEWENANGAN	ANGGARAN	BLOKIR	REALISASI	% DENGAN BLOKIR	% (TANPA BLOKIR)	REALISASI AKRUAL SP2D + OS.KONTRAK	% ACR	% ACR (TANPA BLOKIR)
1	PUSAT	189.769.331	19.525.494	53.673.195	28,28%	31,53%	89.674.149	47,25%	52,67%
2	KANTOR DAERAH	1.035.064.511	204.497.721	146.008.669	14,11%	17,58%	200.182.046	19,34%	24,10%
3	TP. PROVINSI	21.957.564	3.077.375	1.875.508	8,54%	9,93%	1.875.508	8,54%	9,93%
TOTAL		1.246.791.406	227.100.590	201.557.371	16,17%	19,77%	291.731.702	23,40%	28,61%

Sumber: Aplikasi OM-SPAN, 2025 (Bahan Rapim A Ditjen PKH)

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama yaitu: (i) Peningkatan Produksi Pakan Ternak sebesar Rp.55,706 juta atau 0,91% dari pagu anggaran Rp.6,083 miliar, (ii) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebesar Rp.42,345 miliar atau 12,45% dari pagu anggaran Rp.340,206 miliar, (iii) Penyediaan Benih dan bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp.5,532 miliar atau 1,38% dari pagu anggaran Rp.398,288 miliar, (iv) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp.125,426 juta atau 0,72% dari pagu anggaran Rp.17,288 miliar, (v) Program Nilai Tambah dan Daya Saing industri sebesar Rp.475,453 juta atau 10,56% dari pagu anggaran Rp.4,500 miliar (vi) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan sebesar Rp.82,210 miliar atau 17,10% dari pagu anggaran Rp.480,711 miliar.

Tabel 5. Realisasi Anggaran per Kegiatan Utama

NO	Kode I Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	1783 I Peningkatan Produksi Pakan Ternak	PAGU REALISASI	0 0.00%	5,769,213,000 2,205,779,739 (38.23%)	160,000,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	5,929,213,000 2,205,779,739 (37.20%)	
		SISA	0	3,563,433,261	160,000,000	0	0	0	0	0	3,723,433,261	
2	1784 I Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	PAGU REALISASI	0 0.00%	201,552,513,000 95,746,720,267 (47.50%)	133,379,553,000 9,575,799,576 (7.18%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	334,932,066,000 105,322,519,843 (31.45%)	
		SISA	0	105,805,792,733	123,803,753,424	0	0	0	0	0	229,609,546,157	
3	1785 I Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	PAGU REALISASI	0 0.00%	260,251,630,000 30,928,367,445 (11.88%)	134,603,366,000 4,888,111,352 (3.63%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	394,854,996,000 35,816,478,797 (9.07%)	
		SISA	0	229,323,262,555	129,715,254,648	0	0	0	0	0	359,038,517,203	
4	1786 I Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	PAGU REALISASI	0 0.00%	16,305,209,000 3,655,783,501 (22.42%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	16,305,209,000 3,655,783,501 (22.42%)	
		SISA	0	12,649,425,499	0	0	0	0	0	0	12,649,425,499	
5	1787 I Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	PAGU REALISASI	139,287,289,000 103,582,652,087 (74.37%)	339,924,700,000 146,923,598,218 (43.22%)	1,500,000,000 243,679,950 (16.25%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	480,711,989,000 250,749,930,255 (52.16%)	
		SISA	35,704,636,913	193,001,101,782	1,256,320,050	0	0	0	0	0	229,962,058,745	
6	589 I Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	PAGU REALISASI	0 0.00%	4,500,000,000 1,505,270,061 (33.45%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,500,000,000 1,505,270,061 (33.45%)	
		SISA	0	2,994,729,939	0	0	0	0	0	0	2,994,729,939	
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	139,287,289,000 103,582,652,087 (74.37%)	828,303,265,000 280,965,519,231 (33.92%)	269,642,919,000 14,707,590,878 (5.45%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,237,233,473,000 399,255,762,196 (32.27%)	
		SISA	35,704,636,913	547,337,745,769	254,935,328,122	0	0	0	0	0	837,977,710,804	

Sumber: Aplikasi OM-SPAN, 2025 (Bahan Rapim A Ditjen PKH)

Berdasarkan data per 31 Maret 2025 pada Aplikasi SMART Tahun 2025, pagu anggaran APBN Ditjen PKH sebesar Rp.1,246 triliun yang dialokasikan untuk 6 (enam) fungsi yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Klasifikasi Rincian Output sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak

Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak memiliki 5 (lima) KRO yang terdiri dari: 1) Koordinasi; 2) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria; dan 3) Penyidikan dan Pengujian Produk. Realisasi keuangan Direktorat Pakan sampai dengan Triwulan I yaitu sebesar Rp. 1.723.242 atau 0,22% dari pagu Rp. 783.081.000.

Rincian capaian Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak selama Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

a. Klasifikasi Rincian Output (KRO) Koordinasi

KRO Koordinasi terdiri atas 1 Rincian Output (RO) yaitu Koordinasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan berada di satker pusat Direktorat Pakan. Pelaksanaan kegiatan RO ini pada Triwulan I telah menyelesaikan 0,22% kegiatan atau mencapai 0,88% dari target yang direncanakan. hal ini disebabkan adanya pemblokiran anggaran Direktorat Pakan Tahun 2025.

Realisasi keuangan Direktorat Pakan sampai dengan Triwulan I yaitu sebesar Rp.1.723.242 atau 0,22% dari Pagu Rp. 783.081.000,-. Realisasi fisik kegiatan RO berkorelasi positif dengan realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, akumulasi realisasi fisik Triwulan I RO dilakukan dengan menghitung persentase realisasi keuangan untuk pelaksanaan kegiatan, dimana disetarakan hasilnya dengan capaian realisasi fisik RO.

b. KRO Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

KRO Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria terdiri dari 1 RO yaitu Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Pakan berada di satker pusat Direktorat Pakan. Pada Triwulan I belum ditargetkan realisasi NSPK bidang pakan karena masih dalam tahap persiapan. Target kegiatan tersebut selama satu tahun menghasilkan 4 NSPK terkait Bahan Pakan, Pakan Hijauan, Pakan Olahan, serta NSPK Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan.

c. KRO Penyidikan dan Pengujian Produk

KRO Penyidikan dan Pengujian Produk terdiri dari 1 RO yaitu Mutu dan Keamanan Pakan, berada di satker BPMSP Bekasi dengan target 3.887 produk. Capaian realisasi Triwulan I yakni 470 produk atau 48,45% dari yang ditargetkan. Pengukuran realisasi RO pada Triwulan I dilakukan dengan menghitung capaian realisasi penyelesaian target pengujian mutu dan keamanan pakan.

2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pada tahun 2025, Direktorat Kesehatan Hewan memiliki 11 (sebelas) Rincian Output (RO) dengan total pagu anggaran sebesar Rp.340,21 miliar.

Rincian capaian kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

a) KRO Koordinasi

KRO Koordinasi terdiri atas 1 RO yaitu Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan. Selama Triwulan I terealisasi 2 kegiatan (33,33%) dari target sebanyak 6 kegiatan.

b) KRO Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

KRO Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terdiri dari 1 RO yaitu RO Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kesehatan Hewan. Sampai dengan Triwulan I belum ada kegiatan yang terealisasi dari target tahun 2025 sebanyak 7 NSPK.

c) KRO Pelayanan Publik Lainnya

KRO Pelayanan Publik Lainnya terdiri dari 1 RO yaitu RO Layanan Kesehatan Hewan. RO Layanan Kesehatan Hewan selama Triwulan I Tahun 2025 terealisasi 388.163 layanan atau 9,70% dari target tahun 2025 sebanyak 4.000.000 layanan.

d) KRO Penyidikan dan Pengujian Produk terdiri dari 1 RO yaitu Hasil Uji Mutu Obat Hewan. Selama Triwulan I, kegiatan ini terealisasi sebanyak 392 produk atau 15,68% dari target tahun 2025 sebanyak 2.500 produk.

e) KRO Penyidikan dan Pengujian Penyakit

KRO Penyidikan dan Pengujian Penyakit terdiri dari 1 RO yaitu Sampel Penyakit Hewan yang Teramati dan Teridentifikasi. Selama Triwulan I kegiatan ini terealisasi 20,29% atau 13.945 sampel dari target tahun 2025 sebanyak 68.733 sampel.

f) KRO Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup

KRO Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri dari 6 RO yaitu: 1) RO Obat Hewan dan Bahan Biologik yang Diproduksi, terealisasi sebanyak 6.487.803 produk (90,42%); 2) RO SBSN Sarana Biosecurity Center di Wilayah Timur Indonesia, belum ada realisasi; 3) RO SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan, Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah, belum ada realisasi; 4) RO SBSN Prasarana Biosecurity Center di Wilayah Timur Indonesia, belum ada realisasi; 5) RO SBSN Prasarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan, Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah, belum ada realisasi; dan 6) RO

Prasarana Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia, belum ada realisasi.

Capaian Kinerja Fungsi Kesehatan Hewan Triwulan I Tahun 2025 selengkapnya disajikan pada Lampiran 3.

3. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak memiliki 7 (tujuh) KRO yang terdiri dari: 1) Koordinasi; 2) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria; 3) Standarisasi Produk; 4) Pelayanan Publik Lainnya; 5) Bantuan Hewan; 6) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup; dan 7) Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup.

Realisasi Anggaran Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp.5,532 miliar miliar (1,38%).

Rincian capaian kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

a) Klasifikasi Rincian Output (KRO) Koordinasi

KRO Koordinasi terdiri dari 1 Rincian Output (RO) yaitu: Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak. Kegiatan ini selama Triwulan I Tahun 2025 dari target tahunan sebanyak 6 kegiatan, belum ada realisasi kegiatan

b) KRO Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

KRO Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terdiri dari 1 RO yaitu Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak selama Triwulan I Tahun 2025 belum ada realisasi NSPK dari target tahun 2025 sebanyak 6 NSPK.

c) KRO Standarisasi Produk

KRO Standarisasi Produk terdiri dari 2 RO yaitu RO Benih Ternak Unggul dan RO Bibit Ternak Unggul. RO Benih Ternak Unggul terealisasi 1.026.106 produk (16,03%) dari target tahunan 6.400.800 produk. RO Bibit Ternak Unggul terealisasi 133.283 produk (7,45%) dari target tahun 2025 sebanyak 1.790.184 produk.

d) KRO Bantuan Hewan

KRO Bantuan Hewan terdiri dari 3 RO, yaitu: 1) RO Bantuan Ternak Ruminansia Potong; 2) RO Bantuan Ternak Unggas dan, dan 3) RO Bantuan Ternak lainnya. RO Bantuan Ternak Ruminansia Potong belum ada realisasi selama Triwulan I Tahun 2025 dari target tahunan sebanyak 1.000 ekor. RO Bantuan Ternak Unggas belum ada realisasi selama Triwulan I Tahun 2025 dari target tahunan sebanyak 493.500 ekor. Sedangkan RO Bantuan Ternak

Lainnya belum ada realisasi selama Triwulan I Tahun 2025 dari target tahunan sebanyak 100 ekor.

e) KRO Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup

KRO Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup terdiri dari 2 RO yaitu: RO Sarana Perbibitan Ternak dan RO SBSN Sarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari. Selama Triwulan I Tahun 2025 RO Sarana Perbibitan Ternak belum ada realisasi unit dari target sebanyak 19 unit. RO SBSN Sarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari belum ada realisasi dari target Tahun 2025 sebanyak 1.155 unit.

f) KRO Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup

KRO Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup terdiri dari 2 RO yaitu RO Prasarana Perbibitan Ternak dan RO SBSN Prasarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari. RO Prasarana Perbibitan Ternak selama Triwulan I Tahun 2025 belum ada realisasi dari target sebanyak 7 unit. Begitu pula dengan RO SBSN Prasarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari selama Triwulan I belum ada realisasi dari target 1 unit.

Capaian Kinerja Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak Triwulan IV Tahun 2024 selengkapnya disajikan pada Lampiran 4.

4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dalam mendukung kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner didukung alokasi anggaran sebesar Rp. 711.217.000,-, Realisasi anggaran kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar 3,67% atau sebesar Rp 26.095.000,-

Rincian capaian kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner selama Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

a) KRO Koordinasi

KRO Koordinasi terdiri dari 1 RO yaitu Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kesmavet. Progress kegiatan Supervisi Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner, selama Triwulan I telah terealisasi 1 kegiatan (14,29%) dari target tahunan sebanyak 7 kegiatan.

Progres kegiatan Supervisi Monitoring dan Evaluasi Kesmavet yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Edukasi kesejahteraan hewan pada mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH)-UGM secara periodik;
2. FGD dan audiensi dengan Yayasan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) terkait rencana kerja sama terkait program penyelenggaraan kesejahteraan hewan dalam pengendalian rabies di NTT;
3. Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penanganan Hewan Pada Bencana Alam;

4. Koordinasi focal point kesejahteraan hewan dengan World Organization for Animal Health (WOAH);
5. Pelaksanaan penanganan hewan akibat bencana banjir di Kota Bekasi;
6. Dalam rangka percepatan sertifikasi halal untuk unit usaha produk hewan yang juga harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan keamanan produk hewan melalui Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

b) KRO Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

KRO Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terdiri dari 1 RO yaitu Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesmavet. Realisasi fisik kegiatan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner selama Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 1 NSPK atau 10% dari target tahun 2025 sebanyak 10 NSPK.

Progres kegiatan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Nota Dinas Status Rabies tahun 2024;
2. Penyusunan Nota Dinas ke Menteri Pertanian terkait tindak lanjut evaluasi terkait Percepatan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner dan Sertifikasi Halal pada Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia/Unggas;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Sarang Burung Walet;
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian terkait Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Registrasi Produk Hewan;
6. Penyusunan Pedoman Surveilans Resistensi Antimikroba Nasional Tahun 2025;
7. Penyusunan Regulasi Kesejahteraan Hewan dengan melaksanakan public hearing Rapermentan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan. Masukan-masukan dari public hearing ini telah ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan Rapermentan serta dilakukan FGD dengan pemangku kepentingan terkait.

Capaian Kinerja Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner Triwulan I Tahun 2025 selengkapnya disajikan pada Lampiran 5.

5. Alokasi Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025 sebesar Rp. 4.500.000.000,- yang meliputi 3 (tiga) Rincian Output yaitu: Lembaga Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan Ekspor, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan serta Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Posisi anggaran diblokir dan efisiensi sebesar

Rp. 1.892.599.000 (42,06%), sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan sementara senilai Rp. 2.607.401.000 (57,94%) sebagaimana Tabel 9. Realisasi anggaran sebesar Rp. 685.981.000 (15,24%).

Rincian capaian kegiatan Hilirisasi Hasil Peternakan selama Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

a) Klasifikasi Rincian Output Koordinasi (KRO) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

RO Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 belum terealisasi dari target tahun 2025 sebanyak 4 kegiatan.

b) KRO Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Kegiatan NSPK bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan NSPK termasuk kebijakan dibidang pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, dan pemasaran. Target output kegiatan pada tahun 2025 dan realisasi yaitu:

- 1) Rancangan Permentan Perizinan dan Investasi Usaha Peternakan. Progress dari NSPK dalam rancangan permentan perizinan dan investasi usaha peternakan adalah mengidentifikasi data yang diperlukan dalam pembuatan rancangan tersebut.
- 2) Rancangan Pedoman Pendampingan dan Pengawasan Mutu Produk Asal Ternak. Rancangan pedoman ini sedang dalam proses penyusunan.
- 3) Pedoman Umum Operasional Pasar Ternak. Rancangan pedoman ini sedang dalam proses penyusunan.

c) Klasifikasi Rincian Output Koordinasi (KRO) Lembaga yang Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan Ekspor

KRO Lembaga yang Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran dan Ekspor tahun 2025 hanya untuk memfasilitasi pemanfaatan kapal ternak untuk provinsi NTB, NTT dan Gorontalo, namun masih ada kegiatan lain yang terus dipantau antara lain:

1) Koordinasi Pemanfaatan Kapal Ternak

Kapal khusus angkutan ternak merupakan perwujudan tol laut yang bertujuan untuk menjamin kelancaran distribusi ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 hingga sekarang dan telah tersedia 6 (enam) buah armada kapal Camara Nusantara.

Daerah yang menjadi pangkalan trayek kapal khusus angkutan ternak adalah Provinsi NTT, NTB dan Gorontalo, sementara daerah penerima ternak diantara DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Hingga 30 April 2025, Kapal Camara Nusantara telah mengangkut sebanyak 11.206 ekor ternak sapi dari daerah sentra produsen ke daerah konsumen dengan *loading factor* 88%. Mayoritas daerah tujuan kapal ternak yakni wilayah Kalimantan (Samarinda, Balikpapan dan Banjarmasin). Menurunnya permintaan ternak hidup dari NTT di wilayah Jabodetabek menyebabkan kerap dilakukan pengalihan trayek (deviasi) sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan muatan kapal khusus angkutan ternak. Meski begitu pemuatan ke Jabodetabek melalui Pelabuhan Tanjung Priok masih ada namun jumlah muatannya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya

2) Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Peternak

Pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan pada tahun 2024 dialokasikan di 18 (delapan belas) Kawasan di 12 (lima belas) Provinsi, yaitu Aceh (Aceh Besar), Sumatera Selatan (Banyuasin), Sumatera Barat (Solok Selatan), Bengkulu (Bengkulu Utara), Lampung (Lampung Selatan), Jawa Barat (Subang dan Cianjur), Jawa Timur (Probolinggo dan Kediri), Jawa Tengah (Banyumas dan Boyolali), Sulawesi Selatan (Gowa dan Sidrap), Sulawesi Tengah (Morowali), Kalimantan Timur (Penanjam Pasar Utara), Nusa Tenggara Barat (Lombok Timur, Lombok Tengah dan Sumbawa).

Pada triwulan I tahun 2025 anggaran untuk pembinaan pengembangan kawasan korporasi peternakan yang dialokasikan di pusat masih dalam diblokir. Pembinaan pada triwulan I telah dilaksanakan di korporasi provinsi Jawa Timur kabupaten Kediri pada tanggal 22-25 April 2025. Kendala dan permasalahan dalam pada umumnya kegiatan pengembangan kawasan korporasi peternakan belum optimalnya kelembagaan yang terbentuk dan tidak berperannya koperasi sebagai pusat manajemen bisnis dan kelembagaan korporasi yang disebabkan oleh pengelolaan asset masih berada di masing-masing kelompok, bisnis plan belum menjadi menjadi acuan dan bahkan cenderung sulit untuk diterapkan.

3) Pembinaan dan Koordinasi Kemitraan Usaha Peternakan

Kegiatan pembinaan dan koordinasi kemitraan usaha peternakan pada tahun 2025 tidak dialokasikan di provinsi dan anggaran yang

dialokasikan di pusat masih dalam pemblokiran. Kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I adalah:

- Koordinasi dengan KPPU dan PT. MSP beserta Peternak mitra dalam rangka penyelesaian permasalahan kemitraan PT. MSP dengan peternak mitra pada tanggal 4 dan 6 Maret 2025.
- 1. Sosialisasi skema kemitraan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025 yang mengundang pelaku usaha yang akan melakukan kemitraan beserta mitra.

Permasalahan pada umumnya adalah belum pahamnya mengenai kemitraan untuk pelaku usaha yang akan melakukan investasi dan belum sesuai perjanjian dan pelaksanaan kemitraan dengan regulasi kemitraan usaha peternakan. Tindak lanjut yang perlu dilakukan, antara lain Sosialisasi Permentan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan dan pelaksanaannya kepada pelaku usaha.

Capaian Kinerja Fungsi Hilirisasi Hasil Peternakan Triwulan I Tahun 2025 selengkapnya disajikan pada Lampiran 6.

6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKH memiliki 3 (tiga) KRO yaitu: 1) Layanan Dukungan Manajemen Internal, 2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal, dan 3) Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Rincian capaian kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKH sampai dengan Triwulan I 2025 sebagai berikut:

a. KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal

KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari 8 RO yaitu Layanan BMN, Layanan Hukum, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Bantuan Hukum dan Layanan Perkantoran. Sampai dengan Triwulan I 2025, capaian telah terealisasi 26 layanan atau 7,2% dari target tahun 2025 sebanyak 361 layanan.

b. KRO Layanan Sarana Internal

KRO Layanan Sarana Internal memiliki 1 RO yaitu Layanan Sarana Internal. Kegiatan Layanan Sarana Internal Triwulan I 2025 pada tahap pelaksanaan kegiatan dengan target tahun 2025 sebanyak 1 layanan.

c. KRO Layanan Manajemen SDM Internal

KRO Layanan Manajemen SDM Internal terdiri dari 1 RO yaitu RO Layanan Manajemen SDM. Sampai dengan Triwulan I 2025, capaian telah terealisasi 126 layanan atau 6,95% dari target tahun 2025 sebanyak 1.814 layanan.

d. KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal

KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal terdiri dari 3 RO yaitu RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Sampai dengan bulan April 2025, capaian telah terealisasi 101 dokumen atau 13,2% dari target tahun 2025 sebanyak 765 dokumen.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

1. Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Capaian anggaran kegiatan per fungsi Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan Produksi Pakan Ternak 0,91%; (2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 12,45%; (3) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak 1,38%; (4) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner antara 0,72%; (5) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri tercapai 10,56%, dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan tercapai 17,10%.

2. Kinerja Kegiatan Strategis

- a. Pengembangan Investasi dan Populasi Sapi Perah dan/atau Sapi Pedaging

Target penambahan populasi sapi perah dan sapi pedaging tahun 2025 adalah sebanyak 200 ribu ekor sapi perah dan 200 ribu ekor sapi pedaging. Perkembangan investasi sapi perah dan sapi pedaging oleh pelaku usaha pada Triwulan I Tahun 2025:

- Komitmen untuk sapi perah pada tahun 2025-2029 adalah 957.045 ekor dari 187 pelaku usaha dan untuk sapi pedaging adalah 537.460 ekor dari 81 pelaku usaha.
- Komitmen untuk sapi perah pada tahun 2025 adalah 80.394 ekor dari 187 pelaku usaha dan untuk sapi pedaging adalah 82.372 ekor dari 81 pelaku usaha.
- Realisasi pemasukan sampai dengan tanggal 25 April 2025 adalah sejumlah 4.404 ekor sapi perah dari 6 pelaku usaha dan 3.276 ekor sapi pedaging dari 16 pelaku usaha.

- b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Pelaksanaan SBSN selama Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Balai Besar Veteriner Maros

- a. Pengadaan konsultan perencanaan telah dilaksanakan dan berakhir pada tanggal 3 Mei 2025

- b. Review KAK dan HPS konsultan pada tanggal 21-25 April 2025
 - c. Review KAK dan HPS kontrak pada awal Mei 2025
 - d. Rencana pengadaan alat laboratorium sebanyak 12 unit pada bulan April s.d Mei 2025
- 2) Balai Veteriner Bukittinggi
 - a. Sudah melaksanakan kontrak
 - Jasa konsultan manajemen kontruksi selesai pada tanggal 5 Desember 2025
 - Jasa konsultan perencanaan selesai pada tanggal 8 Juni 2025
 - b. Bulan mei 2025 diharapkan kedua pekerjaan sudah selesai
 - c. Realisasi akrual sampai bulan April 2025 sebesar 15% dari pagu sarana sebesar Rp.2.000.000.000,-
- c. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Sebagai upaya pengendalian dan langkah antisipasi kenaikan kasus PMK di Indonesia, telah dilaksanakan distribusi vaksin ke provinsi tertarget sebanyak 1.583.200 dosis dan hingga akhir Maret 2025 pelaksanaan vaksinasi dengan vaksin APBN sudah terealisasi sebanyak total vaksinasi sebanyak 1.118.061 dosis (70,62%) di 28 provinsi, 377 kab, 3.222 kecamatan, dan 11.030 desa.
- d. Pengembangan Ayam Ras Petelur (Ayam Merah Putih)

Dalam rangka mewujudkan kemandirian produksi pangan asal ternak di setiap desa dapat dilakukan introduksi skema klasterisasi peternakan di masing-masing desa terutama di daerah yang defisit produksi telur unggas melalui pemanfaatan pekarangan rumah tangga, sehingga hal ini dapat berkontribusi langsung terhadap program Makan Berglzi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 14 Satker Pelaksana Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan 1 OPD atau Dinas Daerah. Total alokasi kegiatan pengembangan ayam petelur untuk Satker UPT target 490.800 ekor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 163.436.400.000 sedangkan untuk satker OPD target pelaksanaan sebanyak 2.700 ekor dengan pagu sebesar Rp.899.100.000.
- 3. Realisasi kinerja serapan anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan SP2D sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar 10,49% atau Rp.130,774 miliar berikut dengan blokir anggaran yang ada dari total alokasi anggaran Ditjen PKH Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,019 triliun.

4. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Ditjen PKH untuk Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Pada Triwulan I pelaksanaan pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas daging, telur, dan susu menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Data menunjukkan bahwa secara umum semua target produksi berhasil terlampaui, baik untuk komoditas daging berbagai jenis ternak, telur dari unggas, maupun susu sapi perah. Hal ini menjadi indikator positif terhadap ketahanan pangan berbasis protein hewani di Indonesia.
 - b. Secara umum dapat disimpulkan Ditjen PKH telah berupaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan akuntabilitas kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 dengan baik. Meskipun belum sepenuhnya kegiatan telah dilaksanakan, namun upaya pencapaian target indikator kinerja telah secara maksimal diupayakan sesuai dengan progres pelaksanaan kegiatan yang secara optimis dilaporkan akan tercapai sesuai dengan target tahunan.

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 yaitu:

- a. Diperlukan berbagai langkah strategis, seperti peningkatan manajemen pemeliharaan yang efektif-efisien, dan adopsi teknologi pakan berbasis bahan lokal guna meningkatkan produktivitas serta ketersediaan dan kualitas nutrisi ternak dan pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas peternakan untuk mengatasi permasalahan pemenuhan potensi produksi ternak serta komoditas peternakan
- b. Melakukan identifikasi sekaligus evaluasi terhadap pemanfaatan unit RPH, RPHU dan Puskesmas agar unit yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin
- c. Memfasilitasi Sertifikasi NKV melalui anggaran APBD dan melakukan pelatihan auditor NKV baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota
- d. Membentuk Satgas Kemitraan dan Pembinaan/ Pengawasan Kemitraan dan dapat dialokasikan pada APBD

Lampiran 1. Capaian Kinerja Fungsi Pakan Triwulan I Tahun 2025

No	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Satuan	Target Tahunan	Target B03	Capaian B03	%
1	Koordinasi	Kegiatan				
	Koordinasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan	Kegiatan	5	25 %	0,22%	0,88
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK				
	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	NSPK	4	0	dalam progres	
3	Penyidikan dan Pengujian Produk	Produk				
	Mutu dan Keamanan Pakan	Produk	3.887	970	470	48,45

Lampiran 2. Capaian Kinerja Fungsi Kesehatan Hewan Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Sat	Target	Realisasi	% Capaian	Progress
1	Meningkatnya perlindungan hewan ternak dari PHMS	Persentase meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan/ternak pada kab/kota	%	80,50	80,62	100,14	Pola kejadian PMK bergerak fluktuatif, namun sejak minggu kedua Januari 2025 kejadian PMK sudah di bawah rata-rata harian. Sebagai upaya pengendalian dan langkah antisipasi kenaikan kasus PMK di Indonesia, Direktorat Kesehatan Hewan telah melaksanakan distribusi vaksin ke provinsi tertarget sebanyak 1.583.200 dosis dan hingga akhir Maret 2025 pelaksanaan vaksinasi dengan vaksin APBN sudah terealisasi sebanyak total vaksinasi: 1.118.061 dosis (70,62%) di 28 provinsi, 377 kab, 3.222 kecamatan, dan 11.030 desa. Selain itu, Direktorat Kesehatan Hewan juga memberikan bantuan obat-obatan, vitamin dan disinfektan ke wilayah prioritas yaitu Lampung, Pulau Jawa, Bali dan NTB dan beberapa provinsi lainnya. Total distribusi obat, vitamin dan disinfektan sebanyak 79.460 dosis (68,6%) dari total stok 115.900 dosis ke 17 provinsi dan 1 UPT. Penggunaan obat, vitamin dan disinfektan untuk pengobatan

							ternak sakit, meminimalisir efek samping pasca vaksinasi dan disinfeksi kandang dan lingkungan.
2	Meningkatnya hewan yang memenuhi persyaratan kesehatan	Persentase jumlah hewan yang memenuhi persyaratan hewan terhadap total jumlah kesehatan hewan keseluruhan hewan yang diajukan untuk dilalu lintaskan	ekor	70.000	20.890	29,84	Berdasarkan Sertifikat Veteriner (SV) yang dikeluarkan, jumlah hewan yang memenuhi persyaratan hewan yang dilalulintaskan pada TW 1 sebanyak 20.890 ekor.
3	Meningkatnya unit usaha budidaya hewan yang memenuhi persyaratan teknis penerapan biosecurity	Peningkatan unit usaha hewan yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan teknis penerapan biosecurity	Unit	286	253	88,46	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis penerapan biosekuriti sampai saat ini sebanyak 253 unit, sedangkan yang mengajukan sebanyak 474 unit usaha.
4	Meningkatnya ketersediaan obat hewan dan alat kesehatan hewan	Presentase jumlah produk obat hewan dan alat kesehatan hewan yang teregistrasi terhadap jumlah pengajuan registrasi produk obat hewan dan alat kesehatan hewan	%	90	24	26,67	Jumlah pengajuan registrasi obat hewan pada periode Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 409 pengajuan, sedangkan nomor registrasi (PB-UMKU) yang terbit pada Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 182. Nomor registrasi yang terbit merupakan hasil proses verifikasi dan pengujian dari pengajuan sebelumnya. Hingga saat ini tidak terdapat penolakan produk yang diregistrasikan

5	Meningkatnya kemampuan deteksi dan respon cepat kejadian penyakit hewan	Persentase penyakit hewan yang dideteksi dan direspon dengan cepat terhadap jumlah keseluruhan laporan penyakit hewan	%	80	38	47,50	Persentase penyakit hewan yang dideteksi, direspon, dan/atau dilaporkan dengan cepat (0-7 hari) terhadap jumlah keseluruhan laporan penyakit hewan menular strategis Triwulan I Tahun 2025 sebesar 38%.
6	Meningkatnya layanan kelembagaan dan sumber daya Kesehatan hewan guna mendukung Siskeswanas	Persentase jumlah layanan unit pelayanan kesehatan hewan (UPKH) yang sesuai persyaratan dan laboratorium kesehatan hewan sesuai persyaratan	%	59	69	116,95	Jumlah total Puskesmas sebanyak 1.801 unit dan laboratorium kesehatan hewan sebanyak 22 unit.
7	Fasilitasi pemasukan ternak sapi perah dan sapi pedaging impor ke Indonesia melalui investasi	Jumlah pemasukan ternak sapi perah impor ke Indonesia melalui investasi	ekor	35.000	84	0,24	Realisasi pemasukan 84 ekor dari PT Sirukam Lumbung Nagari.
		Jumlah pemasukan ternak sapi pedaging impor ke Indonesia melalui investasi	ekor	35.000	534	1,53	Realisasi pemasukan 523 ekor dari 5 Perusahaan yaitu PT. Mitra Agro Sampurna, PT. Pramana Austindo Mahardika, PT. Sumber Gizi Nusantara, PT. Hade Dinamis dan PT. Way Livestock.

Lampiran 3. Capaian Kinerja Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak Triwulan I Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA UTAMA		KEGIATAN PENDUKUNG (RINCIAN OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI TW I	%	Keterangan
1	Meningkatnya Komoditas Peternakan dalam Negeri yang Tersedia	1	Jumlah Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik)	Benih Ternak Unggul	Produk	6.400.800		1.026.109	16,03	
				Bibit Ternak Unggul	Ekor	1.790.184		241.391	13,48	
				Ternak Ruminansia Potong	Ekor	4.100		0		Proses revisi DIPA dari 4100 ekor menjadi 1000 ekor dan kegiatan blm bisa dilaksanakan karena masih di bintang
				Ternak Unggas	Ekor	600.000		0		Proses revisi DIPA dari 600000 ekor menjadi 493000 ekor dan kegiatan pada tahap CPCL
				Ternak Lainnya	Ekor	200		0		Proses revisi DIPA dari 200 ekor menjadi 100 ekor dan kegiatan blm bisa dilaksanakan karena masih di bintang
				SBSN Sarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari	Unit	1.155		0		Sarana BBIB Singosari masih tahap perencanaan
				Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	6		0		masih dalam tahap persiapan
				SBSN Prasarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari	Unit	1		0		Sarana BBIB Singosari masih tahap perencanaan
				Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	Kegiatan	6		6	22,07	
				Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	NSPK	7		2	28,57	
		2	Peningkatan Produksi Telur	-	-	-				
2	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan	1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sarana Perbibitan Ternak	Unit	18		0		masih dalam tahap persiapan

Lampiran 4. Capaian Kinerja Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya pemenuhan persyaratan sanitary produk hewan pangan dan non pangan yang diterima negara tujuan	Rasio Ekspor Produk Hewan Pangan dan Nonpangan yang Diterima Negara Tujuan karena Telah Memenuhi Persyaratan Kesehatan, Keamanan dan Mutu Produk Terhadap Total Ekspor Produk Hasil Peternakan Per Negara Tujuan	%	100	100	100
2	Tersedianya Daging yang Sehat, Aman dan Bermutu untuk Konsumsi Masyarakat	Rasio penjaminan daging ruminansia yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak ruminansia yang dipotong	%	43,2	44,52	103,06
		Rasio penjaminan daging unggas yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak unggas yang dipotong	%	90,7	94,34	104,01
		Rasio penjaminan daging babi yang sehat, aman, dan bermutu terhadap total ternak babi yang dipotong	%	23,9	5,10	21,34
3	Tersedianya Produk Susu dan Telur yang Berstatus Sehat, Aman dan Bermutu	Rasio produk susu yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk	%	89,5	93	103,91

	untuk Konsumsi Masyarakat	susu yang dihasilkan				
		Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu terhadap total produk telur yang dihasilkan	%	96,9	99	102,17
4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	89,5	98	109,50
5	Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kemanfaatan sarana prasana kesehatan masyarakat veteriner	%	96,7	dihitung pada akhir tahun	-
6	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari zoonosis	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis	%	76,7	89,47	116,65
7	Meningkatnya Penerapan Kesejahteraan Hewan dalam Penanganan Hewan	Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kesejahteraan Hewan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100

Lampiran 5. Capaian Kinerja Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Komoditas Pertanian yang Berdaya Saing	1	Pertumbuhan nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan	%	1	6	626,00
2	Meningkatnya Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah	2	Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	%	95	25	26,32

Lampiran 6. Capaian Kinerja Fungsi Kesekretariatan Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	35,50			

		Tingkat Kepuasan Unit Eselon II di lingkup Ditjen Peternakan terhadap layanan Sekreriat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberikan	Skala Linkert (1-4)	3			
		Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Level	4	-	-	Proses Penilaian
		Persentase Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Terkait Ditjen PKH yang ditindaklanjuti Ditjen PKH	%	85,00	-	-	Proses Penilaian
		Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang Ditindaklanjuti Ditjen PKH Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit yang diberikan Inspektorat Jenderal	%	90,00	-	-	Proses Penilaian
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Ditjen Peternakan dan	Skala Linkert (1-4)	3,075			

		Kesehatan Hewan					
2	Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	90,85	99,63	109,66	

